

**ANALISIS PENGARUH VARIABEL MAKROEKONOMI REGIONAL  
TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN PERKOTAAN**  
(Studi Kasus 44 Kota di Indonesia Tahun 2007-2010)



**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat  
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)  
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis  
Universitas Diponegoro

Disusun oleh:

**DODY NURSETYO YEKTI HAPSORO**

**NIM. C2B007017**

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2013**

## PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Dody Nursetyo Yekti Hapsoro  
Nomor Induk Mahasiswa : C2B007017  
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/IESP  
Judul Skripsi : **Analisis Pengaruh Variabel Makroekonomi  
Regional Terhadap Tingkat Kemiskinan  
Perkotaan** (Studi Kasus 44 Kota di Indonesia  
Tahun 2007-2010)  
Dosen Pembimbing : Drs. H. Edy Yusuf AG, M.Sc. Ph.D.

Semarang, 18 Maret 2013

Dosen Pembimbing,

(Drs. H. Edy Yusuf AG, M.Sc. Ph.D.)

NIP: 19581121984031002

## PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Mahasiswa : Dody Nursetyo Yekti Hapsoro  
Nomor Induk Mahasiswa : C2B007017  
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/IESP  
Judul Skripsi : **Analisis Pengaruh Variabel  
Makroekonomi Regional Terhadap  
Tingkat Kemiskinan Perkotaan** (Studi  
Kasus 44 Kota di Indonesia Tahun 2007-  
2010)

**Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 27 Maret 2013**

Tim penguji :

1. Drs. H. Edy Yusuf AG, M.Sc. Ph.D. (.....)
2. Dr. Nugroho SBM, MSP. (.....)
3. Darwanto, S.E, M.Si. (.....)

Mengetahui,  
Pembantu Dekan I

(Anis Chariri, S.E. MCom. Akt. Ph.D.)  
NIP: 196708091992031001

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Dody Nursetyo Yekti Hapsoro, menyatakan bahwa skripsi dengan judul : “Analisis Pengaruh Variabel Makroekonomi Regional Terhadap Tingkat Kemiskinan Perkotaan (Studi Kasus 44 Kota di Indonesia Tahun 2007-2010)”, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin itu, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 18 Maret 2013

Yang membuat pernyataan,

(Dody Nursetyo Yekti Hapsoro)

NIM: C2B007017

## **ABSTRACT**

*Poverty is a multidimensional problem, it's involves various aspects of life, from the economic to the social. The spread of poor people in Indonesia focused on urban and rural areas. Urban poverty becomes an increasingly relevant issue to be addressed, related to the dynamics of urban development and population growth that accompanies. Trend of population urbanization in Indonesia was followed by further poverty urbanization, it's impact on the incidence of various aspects of the urban poverty problems and urban poverty have rigidity to decline, if compared to rural areas.*

*Regional economic stability have influential on poverty, some macroeconomic variables be indicator. Efforts to address poverty should refer to the development of these variables. The purpose of this study was to analyze a regional macroeconomic variable, in this case GRDP, unemployment, and inflation in urban areas during the period 2007-2010.*

*This study, uses secondary data in panel data form, consisting of time series data over the period 2007-2010 and a cross section 44 cities in Indonesia. The approach to estimate the panel data is Fixed Effect Model (FEM), by including a dummy variable in the equation, also known as the Least Square Dummy Variable (LSDV). Dummy variables regions used in this research model because of each difference in the characteristics and resources of each region.*

*The results showed that GRDP variables have significant negative effect on poverty. Meanwhile, unemployment and inflation variables have positive and significant impact on poverty. Thus, GRDP, unemployment, and inflation is worth a consideration in formulating policies to address the problem of urban poverty.*

**Keywords:** *urban poverty, regional macroeconomic variables, GRDP, unemployment, inflation.*

## ABSTRAKSI

Kemiskinan merupakan permasalahan yang multidimensional, dimana di dalamnya menyangkut berbagai aspek kehidupan, dari aspek ekonomi hingga sosial. Penyebaran penduduk miskin di Indonesia terfokus pada wilayah perkotaan dan pedesaan. Kemiskinan perkotaan menjadi isu yang kian relevan dan mendesak untuk ditangani, terkait dengan dinamika pembangunan perkotaan serta pertumbuhan populasi yang menyertainya. Dalam perkembangannya, terlihat kecenderungan urbanisasi kependudukan di Indonesia juga diikuti dengan urbanisasi kemiskinan yang lebih lanjut berdampak pada timbulnya berbagai aspek permasalahan kemiskinan perkotaan dan membuat kemiskinan perkotaan mempunyai rigiditas dalam penurunannya dibandingkan pedesaan.

Stabilitas perekonomian regional sedikit banyak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan, beberapa variabel ekonomimakro menjadi indikatornya. Upaya dalam mengatasi kemiskinan hendaknya mengacu pada perkembangan variabel-variabel tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis variabel ekonomimakro regional, dalam hal ini PDRB, pengangguran, dan inflasi di perkotaan selama periode tahun 2007-2010.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berupa panel data, terdiri dari data *time series* selama periode 2007-2010 dan data *cross section* 44 kota di Indonesia. Pendekatan yang dipergunakan untuk mengestimasi data panel ialah *Fixed Effect Model* (FEM), dengan memasukkan variabel *dummy* dalam persamaan atau disebut juga dengan *Least Square Dummy Variabel* (LSDV). Variabel *dummy* wilayah digunakan dalam model penelitian ini karena adanya perbedaan karakteristik dan sumber daya yang dimiliki masing-masing daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Sementara itu, variabel pengangguran dan inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Sehingga, PDRB, pengangguran, dan inflasi layak menjadi pertimbangan dalam merumuskan kebijakan untuk mengatasi masalah kemiskinan perkotaan.

**Kata Kunci:** kemiskinan perkotaan, variabel makroekonomi regional, PDRB, pengangguran, inflasi.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya, serta doa sholawat serta salam penulis haturkan ke pangkuan Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu Universitas Diponegoro Semarang.

Dalam penyusunan skripsi yang berjudul “Analisis Pengaruh Variabel Makroekonomi Regional Terhadap Tingkat Kemiskinan Perkotaan (Studi Kasus 44 Kota di Indonesia Tahun 2007-2010)”, tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu, ungkapan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya penulis persembahkan kepada:

1. Ibu dan Bapak, atas untaian doa, nasihat, dan motivasi yang tiada henti kepada penulis. Someday we'll be together.
2. Prof. Drs. Mohamad Nasir, Msi., Akt., Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
3. Drs. H Edy Yusuf AG, MSc, Ph.D dan Alm. Dr. Syafrudin Budiningharto, SU selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, masukan dan saran sehingga penlis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Dra. Tri Wahyu Rejekiningsih, Msi, selaku dosen wali yang banyak memberi bimbingan, arahan, nesehat, dan motivasi selama penulis menjalani studi.

5. Seluruh Dosen dan Staf pengajar Fakultas Ekonomika dan Bisnis UNDIP, yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi penulis.
6. Mbah Klaten, terimakasih telah membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang. Mbah Dadi terimakasih telah merawat semasa pendidikan SMA. Adikku yang beranjak dewasa dan seluruh keluarga besar di Klaten-Purwodadi terima kasih atas semuanya.
7. Teman-teman; Adit, Abenk, Arif Cico, Adji, Eko Syamsul Ma'arif Tahajudin, Hendy, Ari Nuno dan Ana, Kurni, Mbah Darmo dan Yang Ti, Gege, Widhi, Cak Zein. Terima kasih telah memberikan pengalaman dan pembelajaran yang tak terlupakan.
8. Teman-teman IESP 2007 yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Terimakasih telah menjadi bagian hidup penulis selama menempuh studi di Fakultas Ekonomi. Mungkin terkadang kita dipandang inferior, maka harus kita buktikan bahwa kita superior.
9. Lembaga Riset Interest, terimakasih kepada Pak Gie , Mbak Al, Mas Rusli, Mbak Ratih, Mbak Sandy, Mbak Santi, terimakasih telah memberikan pengalaman dan berbagi petuah hidup.
10. Kelompok Studi Pasar Modal dan HMJ IESP, yang telah memberi banyak pengalaman berorganisasi.

11. Tim KKN Bongsari, The Bonks. Terima kasih atas kekompakan selama 35 hari hidup serumah dan hang out bareng setelah KKN.

12. Terakhir untuk semua pihak yang tidak dapat penulis sampaikan satu per satu, yang telah memberikan bantuannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Tanpa dukungan dari pihak-pihak di atas, tentunya penulis tidak akan mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan bagi perbaikan di masa yang akan datang. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak. Aamiin.

Semarang, 18 Maret 2013

Penyusun,

(Dody Nursetyo Yekti Hapsoro)

NIM : C2B007017

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....	iv
ABSTRACT.....	v
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	15
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	17
1.4 Sistematika Penulisan .....	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
2.1 Landasan Teori.....	20
2.1.1 Definisi dan Penyebab Kemiskinan .....	21
2.1.2 Teori dan Ukuran Kemiskinan .....	23
2.1.3 Produk Domestik Regional Bruto .....	27
2.1.4 Pengangguran .....	31
2.1.5 Inflasi .....	35
2.1.6 Perkotaan dan Aglomerasi .....	41
2.2 Pengaruh Variabel Independen terhadap Variabel Dependen .....	47
2.3 Penelitian Terdahulu .....	50
2.4 Kerangka Pemikiran Teoritis .....	55
2.5 Hipotesis.....	58
BAB III METODE PENELITIAN .....	59
3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional .....	59
3.2 Jenis dan Sumber Data .....	61
3.3 Metode Pengumpulan Data .....	62
3.4 Metode Analisis .....	63
3.5 Estimasi Model Regresi .....	63
3.6 Pelanggaran Asumsi Model Linear Klasik .....	70
3.7 Pengujian Statistik Analisis Regresi .....	75
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....	79
4.1 Deskripsi Obyek Penelitian.....	79
4.1.1 Kondisi Kemiskinan di 44 Kota.....	79
4.1.2 Kondisi PDRB di 44 Kota.....	82

4.1.3	Kondisi Pengangguran di 44 Kota .....	84
4.1.4	Kondidi Tingkat Inflasi di 44 Kota .....	87
4.2	Pengujian Asumsi Klasik .....	89
4.2.1	Multikolinearitas .....	89
4.2.2	Heteroskedastisitas .....	90
4.2.3	Autokolinearitas .....	91
4.2.4	Normalitas .....	92
4.3	Pengujian Statistik Analisis Regresi .....	93
4.3.1	Pengujian Koefisien Regresi $R^2$ .....	93
4.3.2	Pengujian Koefisien Regresi Secara Individual (Uji t) .....	95
4.3.3	Pengujian Koefisien Regresi Secara Serentak (Uji F) .....	95
4.4	Interpretasi Hasil .....	96
BAB V	PENUTUP .....	102
5.1	Kesimpulan .....	102
5.2	Keterbatasan .....	103
5.3	Saran .....	103
	DAFTAR PUSTAKA .....	106
	LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	110

## DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1	Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 1999-2011.....	3
Tabel 1.2	Jumlah Populasi 44 Kota Aglomerasi di Indonesia dan Pertumbuhannya Tahun 1999-2007.....	5
Tabel 1.3	Jumlah Penduduk Miskin, Perubahan, dan Persentase Perubahannya di Kota dan Desa Tahun 2007-2011.....	7
Tabel 1.4	Angkatan Kerja, Pengangguran Terbuka, Pengangguran Terbuka 44 Kota dan Persentasenya Terhadap Pengangguran Terbuka di Indonesia Tahun 2007-2010.....	12
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu.....	53
Tabel 3.1	Uji Hausman.....	66
Tabel 4.1	Jumlah Kemiskinan dan Rata-rata Perubahan Selama 2007-2010 di 44 Kota Indonesia.....	80
Tabel 4.2	Jumlah PDRB dan Rata-rata Perubahan Tahun 2007-2010 di 44 Kota Indonesia.....	82
Tabel 4.3	Jumlah Pengangguran dan Rata-rata Perubahan Tahun 2007-2010 di 44 Kota Indonesia.....	85
Tabel 4.4	Tingkat Inflasi dan Rata-ratanya 2007-2010 di 44 Kota Indonesia.....	87
Tabel 4.5	Uji Multikolinearitas: <i>Auxiliary Regression</i> .....	89
Tabel 4.6	Uji Heteroskedastisitas: <i>White Test</i> .....	90
Tabel 4.7	Uji Autokorelasi: <i>Breusch-Godfrey Test</i> .....	91
Tabel 4.8	Hasil Regresi Utama.....	94

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Laju Tingkat Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) dan Kemiskinan di 44 Kota Indonesia Tahun 2007-2010 .....	8
Gambar 1.2 Rata-rata Laju Inflasi di 44 Kota Indonesia Tahun 2007-2010.....	11
Gambar 2.1 Lingkaran Kemiskinan ( <i>Vicious Circle Nurkse</i> ) .....	24
Gambar 2.2 Kurva Philips (Inflasi dan Pengangguran) .....	34
Gambar 2.3 <i>Cost Push Inflation dan demand Pull Inflation</i> .....	37
Gambar 2.4 <i>The Theory of City Size</i> .....	45
Gambar 2.5 Penentuan Harga dan Jumlah Produk dalam Pasar Monopolistik...	26
Gambar 2.6 Kerangka Pemikiran .....	57
Gambar 4.1 Uji Normalitas: <i>Jarque-Bera Test</i> .....	92

## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran A	Data Kemiskinan, PDRB, Pengangguran, dan Inflasi 44 Kota Indonesia Tahun 2007-2010 ..... 110
Lampiran B	Hasil Regresi Utama..... 116
Lampiran C	Uji Asumsi Klasik ..... 119

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Memajukan kesejahteraan umum merupakan salah satu tujuan berbangsa dan bernegara, sesuai yang diamanatkan dalam konstitusi. Pembangunan nasional merupakan upaya dalam mencapai kesejahteraan tersebut. Melalui peningkatan kinerja perekonomian diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja dan menata kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat yang pada gilirannya akan mewujudkan kesejahteraan bagi penduduk Indonesia.

Dimensi kesejahteraan yang begitu luas dan obyektif, menimbulkan kesulitan dalam pengukuran kesejahteraan. Dalam perkembangannya, angka kemiskinan banyak digunakan sebagai *proxy* dalam mengukur tingkat kesejahteraan. Penurunan angka kemiskinan dianggap dapat merepresentasikan peningkatan dalam kesejahteraan.

Kemiskinan merupakan kondisi absolut dan relatif yang menyebabkan seseorang atau kelompok masyarakat dalam suatu wilayah tidak mempunyai kemampuan untuk mencukupi kebutuhan dasarnya sesuai tata nilai atau norma tertentu yang berlaku di dalam masyarakat karena sebab-sebab natural, kultural, maupun struktural. Pandangan ini memperlihatkan luasnya cakupan tentang dimensi kemiskinan. Permasalahan kemiskinan yang begitu kompleks dan bersifat multidimensional, mendorong berbagai upaya pengentasan kemiskinan dilakukan secara komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan dilaksanakan secara terpadu (Muhammad Nasir, dkk, 2008).

Dipandang dari aspek ekonomi, kemiskinan pada dasarnya memperlihatkan adanya suatu kesenjangan antara lemahnya daya pembelian (positif) dan keinginan untuk memenuhi kebutuhan dasar (normatif). Hal tersebut implisit dengan keadaan (a) kemiskinan mencerminkan keadaan rendahnya permintaan agregat sehingga dapat mengurangi insentif untuk mengembangkan sistem produksi, (b) kemiskinan berhubungan dengan penggunaan (rasio) modal/tenaga kerja yang rendah sehingga mengakibatkan produktivitas tenaga kerja yang rendah pula, dan (c) kemiskinan berhubungan dengan keadaan mislokasi beragam sumber daya baik alam maupun manusia (Mudrajad Kuncoro, 2007).

Badan Pusat Statistik (2010) menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*), untuk mengukur kemiskinan. Dengan menggunakan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Sehingga penduduk miskin dapat diartikan sebagai penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Untuk kebutuhan minimum makanan disetarakan dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari. Garis kemiskinan non makanan mempunyai indikator antara lain kebutuhan minimum untuk perumahan, pendidikan, pelayanan kesehatan, fasilitas sanitasi dan layanan air bersih/minum, dan keterbatasan terhadap akses pendanaan dan kapasitas usaha.

Jumlah penduduk miskin di Indonesia dari tahun 1999 hingga 2000 mengalami penurunan, dari angka 47,97 juta jiwa atau 23,43% dari total

penduduk pada tahun 1999 menjadi 31,02 juta jiwa atau sekitar 13,33% dari total penduduk di tahun 2010. Angka kemiskinan yang besar pada tahun 1999 dikarenakan terjadinya krisis ekonomi 1997-1998. Krisis ekonomi yang berkepanjangan, telah mengakibatkan terjadinya kontraksi perekonomian dan mendorong meningkatnya jumlah penduduk miskin (Lepi T.Tarmidi, 1999).

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia**  
**Tahun 1999-2010**

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Juta)	Persentase Terhadap Total Penduduk Pada Tahun Bersangkutan (%)	Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Juta)	Persentase Terhadap Total Penduduk Pada Tahun Bersangkutan (%)
1999	47,97	23,43	2005	35,1	15,97
2000	38,7	19,14	2006	39,3	17,75
2001	37,9	18,41	2007	37,17	16,58
2002	38,4	18,2	2008	34,96	15,42
2003	37,3	17,42	2009	32,53	14,15
2004	36,15	16,66	2010	31,02	13,33

*Sumber: Badan Pusat Statistik, Statistika Indonesia*

Pada awal milenium, angka kemiskinan sudah mengalami penurunan menjadi sebesar 19% atau 38,70 juta jiwa. Penurunan angka kemiskinan pada tahun 2000 terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya. Hingga pada tahun 2006, angka kemiskinan meningkat dari 16% menjadi 17,8%. Peningkatan tersebut dipicu oleh kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) serta gejolak harga pangan, terutama beras, yang menyebabkan kembali naiknya angka kemiskinan di Indonesia yang semula 35,10 juta jiwa menjadi 39,30 juta jiwa pada tahun 2006.

Penyebaran penduduk miskin di Indonesia terfokus pada wilayah perkotaan dan pedesaan. Hasil penelitian Carey dan Ravenstein pada abad ke-19 (dikutip dari Robinson Tarigan, 2008), tentang asal tempat tinggal migran yang datang ke berbagai kota besar di Amerika, menunjukkan bahwa jumlah migran yang masuk ke suatu kota dipengaruhi oleh besarnya jumlah penduduk kota yang didatangi, besarnya jumlah penduduk tempat asal migran, dan jarak antar kota asal dengan kota yang dituju.

Prof. Bintarto (1983) mengatakan bahwa, kota sebagai suatu sistem jaringan kehidupan manusia yang ditandai dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan diwarnai dengan strata sosial ekonomi yang heterogen dan coraknya yang materialistis. Atau dapat pula diartikan sebagai bentang budaya yang ditimbulkan oleh unsur-unsur alami dan non alami dengan gejala-gejala pemusatan penduduk yang cukup besar dengan corak kehidupan yang bersifat heterogen dan materialistis dibandingkan dengan daerah belakangnya (dalam Khairudin, 1992). Uchida dan Nelson (2008) (dalam *World Bank*, 2012) mengemukakan bahwa terdapat 44 kota di Indonesia yang teraglomerasikan dengan wilayah di sekitarnya. Penentuan ke 44 kota ini menggunakan data Susenas dengan berdasar beberapa kriteria, antara lain: (i) Kepadatan penduduk minimal 700 orang per kilometer persegi untuk Jawa dan 200 untuk pulau-pulau lain; (ii) adanya pusat kota dengan populasi minimal 50.000; dan (iii) waktu perjalanan komuter ke pusat wilayah ialah 90 menit untuk Jakarta dan 60 menit untuk aglomerasi lain.

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Populasi 44 Kota Aglomerasi di Indonesia dan Pertumbuhannya**  
**Tahun 1999-2007**

No.	Nama Kota	Jumlah Populasi				Pertumbuhan (%)		
		1999	2002	2005	2007	2002	2005	2007
1	Jakarta <sup>1</sup>	24087455	23925397	25795949	26750001	-0.67	7.82	3.70
2	Surabaya	9690650	9851508	10364636	10501043	1.66	5.21	1.32
3	Bandung	6067916	6478492	6983461	7156927	6.77	7.79	2.48
4	Yogyakarta	6017350	6345099	6536464	6653353	5.45	3.02	1.79
5	Cirebon	5892488	6113864	6410264	6451311	3.76	4.85	0.64
6	Semarang	4713515	4878561	5016351	5049775	3.50	2.82	0.67
7	Medan	2254265	4216854	4432717	4634417	87.06	5.12	4.55
8	Kediri	3699737	3716133	3869799	3829444	0.44	4.14	-1.04
9	Pekalongan	2994265	3103484	3227247	3152589	3.65	3.99	-2.31
10	Mataram	2747941	2912095	2927341	3038078	5.97	0.52	3.78
11	Surakarta	2888353	2930166	3074990	2995529	1.45	4.94	-2.58
12	Makassar	2201438	2240979	2313244	2378334	1.80	3.22	2.81
13	Bandar Lampung	2641552	1927206	2032144	2153552	-27.04	5.45	5.97
14	Padang	1681048	1567594	1715324	1788924	-6.75	9.42	4.29
15	Tegal	1668301	1648116	1720655	1648185	-1.21	4.40	-4.21
16	Denpasar	1164113	1324885	1384640	1431525	13.81	4.51	3.39
17	Palembang	1426335	1512424	1338539	1396823	6.04	-11.50	4.35
18	Tanjung Balai	418943	1148347	1177572	1211994	174.11	2.54	2.92
19	Payakumbuh	1090913	972931	1032143	1022116	-10.81	6.09	-0.97
20	Malang	813164	766867	780445	810651	-5.69	1.77	3.87
21	Madiun	805026	774668	804635	799756	-3.77	3.87	-0.61
22	Pekan Baru	597230	660229	707120	781126	10.55	7.10	10.47
23	Banjarmasin	558550	539060	574259	616018	-3.49	6.53	7.27
24	Manado	538456	536287	592131	596134	-0.40	10.41	0.68
25	Samarinda	602406	543713	576744	593827	-9.74	6.08	2.96
26	Pontianak	478136	482890	494384	513315	0.99	2.38	3.83
27	Balikpapan	442060	421177	434127	501150	-4.72	3.07	15.44
28	Jambi	435821	431709	460427	458226	-0.94	6.65	-0.48
29	Pare-Pare	348668	339289	344513	342625	-2.69	1.54	-0.55
30	Sukabumi	235163	261861	308595	311496	11.35	17.85	0.94
31	Palu	256914	275186	287576	303547	7.11	4.50	5.55
32	Kupang	228386	254053	268828	284895	11.24	5.82	5.98
33	Bengkulu	313190	304188	275418	268276	-2.87	-9.46	-2.59
34	Ambon	328806	178084	232448	256887	-45.84	30.53	10.51

<sup>1</sup> Jakarta merupakan wilayah aglomerasi dari beberapa kota administratif.

35	Kendari	173040	211881	227190	251725	22.45	7.23	10.80
36	Pemantang Siantar	238518	246739	229158	234416	3.45	-7.13	2.29
37	Probolinggo	198839	193816	203368	221916	-2.53	4.93	9.12
38	Banda Aceh	239751	220593	177744	219336	-7.99	-19.42	23.40
39	Jayapura	202320	170158	201752	214991	-15.90	18.57	6.56
40	Tarakan	-	125988	157818	175038	-	25.26	10.91
41	Gorontalo	138886	137650	156390	160360	-0.89	13.61	2.54
42	Pangkal Pinang	140374	127942	154876	154830	-8.86	21.05	-0.03
43	Tebing Tinggi	138180	126570	135252	139428	-8.40	6.86	3.09
44	Sibolga	81312	83991	89692	90618	3.29	6.79	1.03
Total Populasi		91879774	95228724	100228370	102544507	3.64	5.25	2.31

*Sumber: World Bank 2012*

Urbanisasi penduduk miskin lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan populasi penduduk kota itu sendiri, hal ini merefleksikan terjadi perlambatan dalam upaya penurunan kemiskinan di perkotaan (Ravallion, Chen, and Sangraula, 2007). Tabel 1.3 menunjukkan, pada tahun 2007 hingga 2011, terjadi penurunan jumlah penduduk miskin baik itu di kawasan desa maupun kota, dari angka 13.559.300 jiwa di kota pada tahun 2007, menjadi 11.046.750 jiwa. Hal yang senada juga terjadi di desa, pada tahun 2007 jumlah penduduk miskin adalah 23.609.000 jiwa dan turun pada tahun 2011 menjadi 18.972.200 jiwa. Walaupun secara riil, angka kemiskinan di kedua daerah tersebut mengalami penurunan, tetapi terdapat perbedaan dalam persentase perubahan penurunan penduduk miskin. Perubahan angka kemiskinan di pedesaan cenderung lebih cepat, pada tahun 2011 angka kemiskinan berkurang sebesar 5,03%. Sementara itu perubahan angka kemiskinan di perkotaan pada tahun yang sama (2011), hanya mengalami penurunan sebesar 0,46% dari tahun sebelumnya, dan rata-rata perubahan tiap tahunnya wilayah kota lebih kecil dibandingkan pedesaan dengan besaran 5,29 persen menunjukkan rigiditas kemiskinan perkotaan.

**Tabel 1.3**  
**Jumlah Penduduk Miskin, Perubahan Penduduk Miskin, dan**  
**Persentase Perubahan Penduduk Miskin Kota dan Desa di Indonesia**  
**Tahun 2007-2011**

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (000)			Perubahan Penduduk Miskin (000)		Persentase Perubahan Penduduk Miskin	
	Kota	Desa	K+D	Kota	Desa	Kota	Desa
2007	13559,3	23609	37168,3	-	-	-	-
2008	12768,5	22194,8	34963,3	790,8	1414,2	6,19	6,37
2009	11910,5	20619,4	32529,9	858	1575,4	7,20	7,64
2010	11097,8	19925,6	31023,4	812,7	693,8	7,32	3,48
2011	11046,75	18972,2	30018,93	51,05	953,42	0,46	5,03
Rata-rata Perubahan Tiap Tahun						5,29	5,63

*Sumber: Badan Pusat Statistik, Statistik Indonesia*

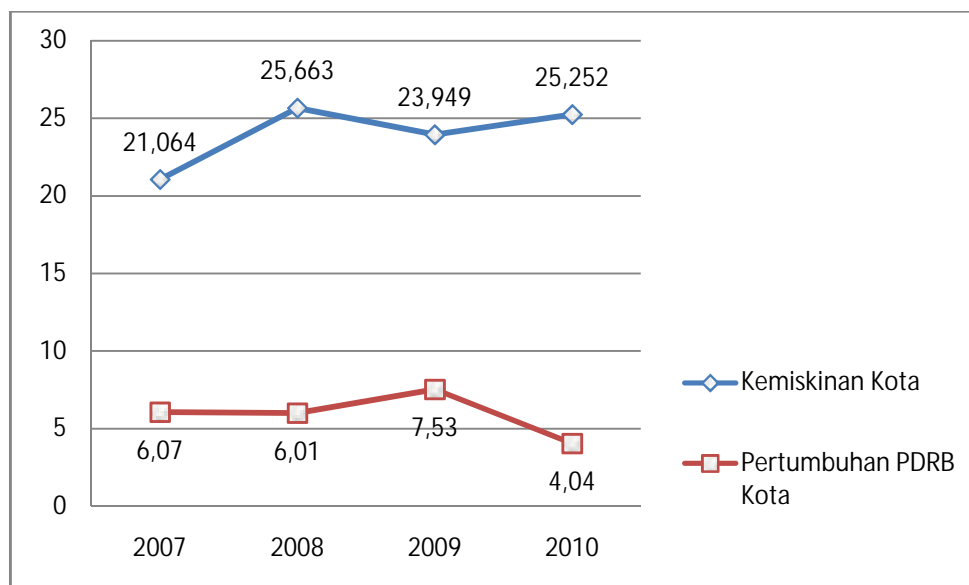
Suatu situasi dimana pendapatan tahunan individu di suatu kawasan tidak dapat memenuhi standar pengeluaran minimum yang dibutuhkan individu untuk dapat hidup layak di kawasan tersebut, maka kecenderungan yang demikian dapat dikatakan sebagai bentuk dari kemiskinan. Individu yang hidup di bawah standar pengeluaran minimum tersebut tergolong miskin (negara atau kawasan tertentu yang lebih kecil), terdapat lebih banyak pendapatan untuk dibelanjakan, yang jika terdistribusi dengan baik di antara penduduk kawasan tersebut akan mengurangi kemiskinan. Dengan kata lain, secara teoritis, pertumbuhan ekonomi memainkan peranan penting dalam mengatasi masalah penurunan kemiskinan (Hermanto S dan D. Wahyuniarti, 2008).

Boediono (dalam Kuncoro 2004) mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan *output* per kapita dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan dan merupakan syarat keharusan (*necessery condition*) bagi

pengurangan tingkat kemiskinan. Adapun syarat kecukupan (*sufficient condition*) ialah bahwa pertumbuhan ekonomi tersebut hendaklah menyebar di setiap golongan pendapatan, termasuk di golongan penduduk miskin. Secara langsung, hal ini berarti pertumbuhan itu perlu dipastikan terjadi di sektor-sektor dimana penduduk miskin bekerja serta terjadi pada wilayah-wilayah basis kemiskinan baik perkotaan maupun pedesaan sehingga pertumbuhan ekonomi yang berkualitas akan lebih berdampak nyata dalam pengurangan angka kemiskinan.

PDRB merupakan salah satu indikator pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. PDRB ialah nilai bersih barang dan jasa-jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode. Sehingga dapat dikatakan, semakin tinggi PDRB suatu daerah, maka semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut (Hadi Sasana, 2006).

**Gambar 1.1**  
**Laju Tingkat Pertumbuhan Ekonomi (PDRB)**  
**dan Kemiskinan di 44 Kota Indonesia**  
**Tahun 2007-2010**



Sumber: Badan Pusat Statistik, Statistik Indonesia

Gambar 1.1 menunjukkan komparasi antara tingkat pertumbuhan ekonomi dengan tingkat kemiskinan di 44 kota Indonesia, kedua grafik tersebut mengalami kenaikan dan penurunan sepanjang periode 2007-2010. Pada tahun 2010 ketika persentase pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan menjadi 4,04%, persentase tingkat kemiskinan pada tahun 2010 mengalami peningkatan, dari 23,949 pada 2009 menjadi 25,252. Pada tahun 2009 terjadi penurunan jumlah penduduk miskin dari 25,663 pada tahun 2008 menjadi 23,949. Persentase pertumbuhan ekonomi juga terjadi pada tahun 2009, dari 6,01% di 2008 menjadi 7,53%. Pada tahun 2008, persentase tingkat pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan menjadi hanya 6,01% dari tahun 2007 sebesar 6,07%, persentase jumlah kemiskinan juga mengalami kenaikan di tahun 2008, menjadi 25,663 dari tahun 2007 yang besarnya 21,064. Kecenderungan yang ditunjukkan dalam grafik 1.1, ketika terjadi kenaikan pertumbuhan ekonomi (kenaikan angka PDRB) maka akan terjadi penurunan jumlah kemiskinan pada tahun yang bersangkutan.

Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas perlu didukung oleh kestabilan kondisi makroekonomi dalam efektifitas upaya mengurangi jumlah angka kemiskinan. Inflasi merupakan salah satu variabel dalam makroekonomi dan peristiwa moneter yang berkaitan erat dengan kemiskinan. Inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk mengalami kenaikan dan berlangsung secara terus-menerus. Rendahnya pendapatan dan tingginya harga mengimplikasikan ketidakmampuan dalam pemenuhan kebutuhan hidup layak bagi penduduk miskin. Hal tersebut seakan menegaskan pendapat bahwa inflasi merupakan pajak atas orang miskin, karena orang miskin mengalokasikan

sebagian besar dari penghasilan mereka (atau hasil produksi, jika mereka menjadi pekerja di sektor pertanian atau sektor informal di perkotaan) untuk bertahan hidup (Agenor, 2005).

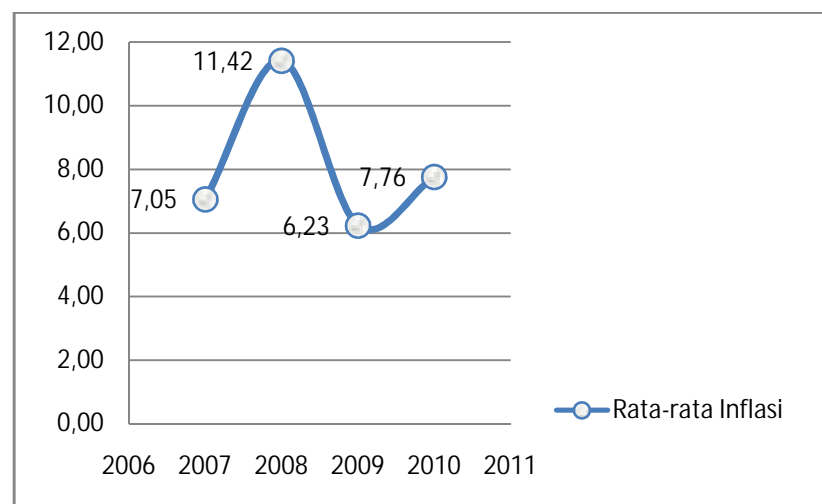
Dumairy (1996) mengatakan bahwa perbandingan besar pengeluaran per kapita penduduk perkotaan terhadap penduduk pedesaan cenderung konstan tahun demi tahun. Pengeluaran orang kota hampir selalu dua kali lipat pengeluaran orang desa. Sehingga penduduk miskin di kota merasakan tingkat inflasi yang lebih besar dari pada pedesaan, karena jumlah pengeluaran yang lebih besar. Dengan demikian tingkat inflasi juga akan memberikan tekanan yang besar terhadap tingkat kemiskinan di perkotaan.

Fischer (2000) dalam penelitiannya tentang inflasi dan kemiskinan menemukan bahwa masyarakat miskin, pekerja yang tidak berpendidikan dan tidak mempunyai keahlian, relatif merasakan inflasi sebagai kekhawatiran atau kerugian daripada keuntungan. Beberapa faktor yang menyebabkannya antara lain; keterbatasan terhadap akses lembaga keuangan, kepemilikan aset atau modal tetap yang minim, dan sistem pengupahan yang tetap. Penelitian Fischer juga membuktikan bahwa masyarakat miskin lebih menderita akibat dari inflasi dari pada orang kaya.

Dalam gambar 1.2. menunjukkan pergerakan inflasi di 44 kota Indonesia dari tahun 2007 hingga 2010 yang fluktuatif. Kenaikan angka inflasi terjadi di tahun 2008, kenaikan harga bahan bakar minyak menjadi pemicu kenaikan inflasi pada tahun ini. kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak sebanyak 80 persen untuk menekan pengeluaran subsidi pemerintah tahun fiskal

2008. Kenaikan harga bahan bakar minyak menyebabkan kenaikan biaya produksi barang sehingga mengakibatkan terjadinya *cost push inflation*. Pada tahun 2009 angka inflasi mengalami penurunan, dari 11,42 di tahun 2008 menjadi hanya 6,23.

**Gambar 1.2**  
**Rata-rata Laju Inflasi di 44 Kota Indonesia**  
**Tahun 2007-2010**



*Sumber: Badan Pusat Statistik, Statistik Indonesia.*

Kebutuhan manusia untuk hidup layak yang semakin sulit untuk dicapai, dimana salah satu penyebabnya ialah kenaikan harga (inflasi), menuntut mereka untuk berusaha memenuhi kebutuhannya, hal yang biasa dilakukan adalah bekerja untuk mendapatkan penghasilan. Konsekuensi yang diterima apabila mereka tidak bekerja atau menganggur ialah ketidakmampuan memenuhi kebutuhannya dengan baik, kondisi ini membawa dampak bagi tercipta dan bertambahnya jumlah penduduk miskin yang telah ada. Mereka yang sebagian besar tidak mempunyai pekerjaan tetap atau hanya bekerja paruh waktu, selalu berada diantara kelompok masyarakat yang miskin. Tingginya jumlah penduduk miskin, mempunyai

hubungan yang erat dengan tingginya jumlah pengangguran (Lincoln Arsyad, 1999).

Tabel 1.5 menunjukkan penurunan angka pengangguran terbuka<sup>2</sup> di Indonesia dari tahun 2007 hingga 2010, serta fluktuasi angka pengangguran terbuka di 44 kota. Terlihat pada tahun 2007 jumlah pengangguran terbuka di Indonesia sebesar 10.011.142 jiwa menjadi hanya 8.319.779 jiwa di tahun 2010. Akan tetapi, persentase pengangguran terbuka 44 kota terhadap jumlah pengangguran terbuka di Indonesia naik, pada tahun 2007 sebesar 17,28 persen, menjadi 22,45 persen pada tahun 2010. Walaupun jumlah angkatan kerja terus meningkat dari tahun ketahun, angka pengangguran menurun tiap tahunnya yang berarti bahwa sejumlah besar angkatan kerja telah mendapatkan pekerjaan, tetapi terjadi peningkatan jumlah pengangguran terbuka di 44 kota yang laju pertumbuhannya lebih cepat dibandingkan pengangguran terbuka seluruh Indonesia.

**Tabel 1.4**  
**Angkatan Kerja, Pengangguran Terbuka, Pengangguran**  
**Terbuka 44 Kota, dan Persentase Pengangguran Terbuka 44 kota**  
**terhadap Pengangguran Terbuka di Indonesia**  
**Tahun 2007-2010**

Tahun	Angkatan Kerja	Pengangguran Terbuka	Pengangguran Terbuka 44 Kota	Persentase
2007	109.941.359	10.011.142	1.729.522	17,28
2008	111.947.265	9.394.515	1.949.264	20,75
2009	113.833.280	8.962.617	1.810.912	20,21
2010	116.527.546	8.319.779	1.867.949	22,45

*Sumber: Badan Pusat Statistik, Statistik Indonesia*

<sup>2</sup> Pengangguran Terbuka: mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, sudah punya pekerjaan tetapi belum dimulai.

Hasil kajian *World Bank; Employment and Income Distribution in Indonesia, 1980* (dalam Sukanto dan Karseno, 1985) menunjukkan perbandingan angka pengangguran kota dan desa di Indonesia. Di wilayah kota dari tahun 1971 hingga 1976, terjadi peningkatan angka pengangguran sebesar 9,8%, atau angka pengangguran sebesar 6,4% dari total kesempatan kerja yang tersedia pada tahun 1976. Di pedesaan, terjadi hal yang serupa dengan skala jumlah yang lebih kecil. Pada tahun 1971 hingga 1976, terjadi peningkatan angka pengangguran sebesar 3,6%, akan tetapi presentase angka pengangguran terhadap jumlah kesempatan kerja desa pada tahun 1976 sebesar 1,6%, menurun dibanding pada tahun 1971 sebesar 1,8%. Dari data tersebut terlihat proporsi angka pengangguran di kota meningkat lebih pesat dibanding wilayah desa. Dalam perkembangannya, angka pengangguran di perkotaan relatif serupa, mengingat tingkat urbanisasi pada tahun 1980an hingga 1990an terus meningkat tanpa disertai ketersediaan lapangan kerja yang memadai di perkotaan.

Ketika arus perpindahan tenaga kerja dari daerah pedesaan ke perkotaan telah melampaui tingkat penciptaan lapangan kerja, mengakibatkan migrasi yang terjadi jauh melampaui daya serap sektor industri dan jasa di daerah perkotaan. Dengan demikian migrasi internal, terutama migrasi dari desa ke kota, tidak dapat lagi dipandang sebagai faktor yang positif dalam mengatasi permintaan tenaga kerja di perkotaan. Sebaliknya, sekarang migrasi harus dilihat sebagai sebuah faktor negatif yang menyebabkan surplus tenaga kerja perkotaan secara berlebihan serta sebagai suatu kekuatan yang secara terus-menerus memperburuk masalah-masalah pengangguran di daerah perkotaan yang pada awalnya bersumber dari

ketidakseimbangan struktural dan ekonomi antara daerah-daerah perkotaan dan pedesaan (Todaro, 2000).

Di banyak negara berkembang, tingkat pengangguran di perkotaan paling sedikit dua sampai tiga kali lipat daripada tingkat pengangguran di pedesaan. Hal ini kontras dengan kondisi di negara-negara maju yang tingkat pengangguran perkotaannya justru jauh lebih rendah. Berdasarkan data-data yang tersebar mengenai sejumlah besar angkatan kerja yang berada dalam kondisi pengangguran terselubung (mereka yang hanya bekerja secara sambilan di sektor informal), maka angka total pengangguran di perkotaan (yang terbuka maupun terselubung) di banyak negara berkembang akan melonjak hingga 30 persen (Todaro, 2000).

Negara-negara terbelakang dihadapkan pada dua macam problem tenaga kerja. Mereka kekurangan ketrampilan kritis yang dibutuhkan bagi sektor industri dan mempunyai tenaga buruh surplus. Adanya buruh surplus dalam batas tertentu merupakan akibat langkanya ketrampilan kritis. Karenanya kedua macam problem ini saling berkaitan satu dengan yang lain. Pembentukan modal manusia merupakan salah satu kebijakan yang bertujuan memecahkan problem-problem ini dengan menciptakan ketrampilan yang diperlukan manusia sebagai sumber produktif dan memberinya pekerjaan yang menguntungkan (Jhingan, 2010).

Perkembangan angka kemiskinan yang terkonsentrasi di wilayah perkotaan menimbulkan permasalahan yang kompleks di perkotaan. Dalam penelitian ini akan dianalisis bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi perkotaan (PDRB), pengangguran terbuka dan tingkat inflasi terhadap jumlah

penduduk miskin di perkotaan. Sejumlah 44 kota dipilih sebagai indikator yang dapat merefleksikan wilayah perkotaan di Indonesia. Untuk pengolahan data akan digunakan metode *panel data* dengan meregresi data yang diperoleh dari 44 kota pada kurun waktu 2007 hingga 2010.

## 1.2 Rumusan Masalah

Jumlah kemiskinan di perkoataan menjadi permasalahan tersendiri bagi pemerintah kota, dimana terdapat rigiditas perubahan angka kemiskinan dibandingkan dengan wilayah pedesaan yang lebih cepat dalam penurunan kemiskinan. Di sisi lain, kekakuan perubahan angka kemiskinan perkotaan didorong oleh angka perpindahan penduduk yang juga disertai perpindahan angka kemiskinan ke dalam kota (Sambhodo, dkk,2011). Terlihat pada tabel 1.1 terjadi penurunan jumlah kemiskinan di Indonesia dari tahun 1999 hingga 2010, tetapi penurunan angka kemiskinan nasional tidak serta merta diikuti penurunan jumlah kemiskinan di perkotaan, hal ini terlihat pada tabel 1.2 pada tahun 1999 hingga 2007, jumlah kemiskinan di 44 kota mengalami kenaikan.

Dalam upaya penanggulangannya, pengurangan dalam angka kemiskinan mensyaratkan terjadinya pertumbuhan ekonomi (PDRB). Pada gambar 1.1 terlihat fluktuasi pertumbuhan ekonomi, ketika terjadi pertumbuhan ekonomi terjadi pula penurunan jumlah penduduk miskin, tetapi dalam periode tertentu penurunan pertumbuhan ekonomi juga disertai dengan penurunan kemiskinan. Ketika terjadi pertumbuhan ekonomi, jumlah kemiskinan akan menurun (Hermanto S dan D. Wahyuniarti, 2008). Hasil penelitian yang berbeda dikemukakan oleh Datt dan Ravallion (1998, 1999) dalam Suryahadi Suryadarma

Sumarto (2009), pada provinsi yang mengalami pertumbuhan tinggi dalam periode yang lama, mempunyai angka kemiskinan yang tinggi dimana migrasi masuk dari provinsi lainnya menyumbang besarnya angka kemiskinan tersebut. Melalui penelitian tersebut, dapat dikatakan pertumbuhan ekonomi memiliki korelasi positif terhadap kemiskinan, diimplikasikan pada pertumbuhan ekonomi yang terasosiasikan oleh kenaikan dalam angka kemiskinan.

Gambar 1.2 menunjukkan laju inflasi di 44 kota Indonesia yang berfluktuasi dari tahun ke tahun, mengacu pada kebijakan makro yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Pada tahun 2008 angka inflasi menembus angka dua digit yakni 11,42, pada tahun yang sama jumlah kemiskinan juga meningkat menjadi 26,663. Dalam penelitian Cutler dan Katz (1991) menemukan bahwa inflasi memberikan pengaruh yang relatif kurang signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Sedangkan Powers (1995) dan Blank (1993), menemukan hubungan yang signifikan antara inflasi dan tingkat kemiskinan.

Faktor lain yang diduga berpengaruh terhadap angka kemiskinan perkotaan ialah jumlah pengangguran. Perkotaan yang menjadi konsentrasi berbagai kegiatan ekonomi seolah memberikan daya tarik tersendiri terhadap sejumlah besar angkatan kerja di daerah lain dalam mencari peluang pekerjaan di kota, seperti yang terlihat pada tabel 1.3 dimana perubahan angka kemiskinan kota cenderung lebih sulit untuk berkurang daripada di desa. Kemudian, pengangguran timbul ketika permintaan tenaga kerja di kota tidak mampu sepenuhnya menyerap penawaran tenaga kerja. Kondisi menganggur menyebabkan hilangnya sejumlah pendapatan yang digunakan dalam pemenuhan kebutuhan

hidup, sehingga salah satu komponen kemiskinan di kota diduga berasal dari angka pengangguran. Seperti yang dibuktikan dalam penelitian Powers (1995) dan juga penelitian Cutler dan Katz (1991), bahwa penurunan jumlah pengangguran signifikan dan berkorelasi positif terhadap penurunan jumlah kemiskinan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka persoalan penelitian yang hendak dipecahkan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap jumlah penduduk miskin perkotaan?
2. Bagaimana pengaruh angka pengangguran terbuka terhadap jumlah penduduk miskin perkotaan?
3. Bagaimana pengaruh tingkat inflasi terhadap jumlah penduduk miskin perkotaan?
4. Bagaimana pengaruh PDRB, angka pengangguran, dan tingkat inflasi secara bersama-sama, terhadap jumlah penduduk miskin perkotaan?

### **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

- 1) Menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap jumlah kemiskinan perkotaan.
- 2) Menganalisis pengaruh angka pengangguran terbuka terhadap jumlah kemiskinan perkotaan.

- 3) Menganalisis pengaruh tingkat inflasi terhadap jumlah kemiskinan perkotaan.
- 4) Menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, pengangguran terbuka, dan tingkat inflasi secara bersama-sama, terhadap jumlah kemiskinan perkotaan.

### **1.3.2 Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada:

- 1) Pengambil Kebijakan

Bagi pengambil kebijakan, penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang berguna dalam memahami pengaruh pertumbuhan ekonomi, pengangguran terbuka, dan tingkat inflasi terhadap jumlah penduduk miskin perkotaan, sehingga dapat digunakan sebagai pilihan pengambil kebijakan dalam perencanaan pembangunan khususnya wilayah perkotaan.

- 2) Ilmu Pengetahuan

Secara umum hasil penelitian ini diharapkan menambah khasanah ilmu ekonomi khususnya ekonomi pembangunan. Manfaat khusus bagi ilmu pengetahuan yakni dapat melengkapi kajian mengenai jumlah penduduk miskin perkotaan, dengan mengungkap secara empiris bagaimana pertumbuhan ekonomi, angka pengangguran, dan tingkat inflasi mempengaruhinya.

#### 1.4 Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dengan sistematika Bab yang terdiri dari: Bab I Pendahuluan, Bab II Tinjauan Pustaka, Bab III Metode Penelitian, Bab IV Hasil dan Pembahasan, serta Bab V Kesimpulan, Keterbatasan dan Saran.

**BAB I : Pendahuluan**

Bab ini menguraikan bagian pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.

**BAB II : Tinjauan Pustaka**

Bab ini menguraikan landasan teori, hubungan antar variabel independen terhadap variabel dependen, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran teoritis, dan menarik suatu hipotesis penelitian.

**BAB III : Metode Penelitian**

Bab ini menguraikan variabel penelitian dan definisi operasional, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis data.

**BAB IV : Hasil dan Pembahasan**

Bab ini menguraikan analisis deskriptif dan obyek penelitian, analisis data, pengujian hipotesis, dan pembahasan.

**BAB V : Penutup**

Bab ini merupakan bab terakhir yang akan menguraikan kesimpulan dan keterbatasan dari penelitian serta saran-saran.

## **BAB II**

### **TELAAH PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

Teori digunakan untuk menjelaskan observasi yang sudah ada. teori menjelaskan keterkaitan antar sesuatu fenomena yang akan diteliti. Eksistensi suatu teori ekonomi sangat ditentukan oleh kemampuannya dalam menjelaskan fenomena perekonomian yang aktual. Karena itu, analisis teoritis dan pembuktian empiris menjadi dua hal yang akan selalu dilakukan secara bersama-sama dalam setiap bidang ilmu, termasuk ilmu ekonomi.

Bab ini akan menyajikan penelaahan mengenai teori kemiskinan, Produk Domestik Regional Bruto, pengangguran, dan inflasi. Untuk mendapatkan justifikasi dan pembuktian empiris mengenai bentuk keterkaitan antara besarnya Produk Domestik Regional Bruto dan berbagai variabel ekonomi lainnya dengan jumlah kemiskinan di daerah perkotaan, selanjutnya dilakukan tinjauan berbagai studi empiris sebelumnya yang relevan.

##### **2.1.1 Definisi dan Penyebab Kemiskinan**

Kemiskinan merupakan permasalahan multidimensional, artinya kebutuhan manusia yang kompleks tercakup dalam berbagai aspek. Aspek primer yang berupa miskin akan aset, organisasi sosial politik, pengetahuan, dan ketrampilan. Aspek sekunder yang berupa miskin akan jaringan sosial, sumber-sumber keuangan, dan informasi. Dimensi-dimensi kemiskinan tersebut termanifestasikan dalam bentuk kekurangan gizi, air perumahan yang sehat, perawatan kesehatan yang kurang baik, dan tingkat pendidikan yang rendah.

Selain itu, dimensi-dimensi kemiskinan saling berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini berarti kemajuan atau kemunduran pada salah satu aspek dapat mempengaruhi kemajuan dan kemunduran aspek lainnya. Aspek lain dari kemiskinan ini, bahwa yang miskin ialah manusianya baik secara individual maupun kolektif (Lincoln Arsyad, 1999).

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar tersebut antara lain: (1) terpenuhinya kebutuhan pangan; (2) kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan; (3) rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan; (4) hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik. Sementara itu, BKKBN mendefinisikan kemiskinan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri dengan taraf kehidupan yang dimiliki dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga, mental maupun fisiknya untuk memenuhi kebutuhannya.

Dalam konteks penyebab terjadinya kemiskinan, maka kemiskinan didefinisikan sebagai suatu *integrated concept* yang memiliki lima dimensi, yaitu: (1) kemiskinan (*proper*), (2) ketidakberdayaan (*powerless*), (3) kerentanan menghadapi situasi darurat (*state of emergency*), (4) ketergantungan (*dependence*), dan (5) keterasingan (*isolation*) baik secara geografis maupun sosiologis. Hidup dalam kemiskinan bukan hanya hidup dalam kekurangan uang dan tingkat pendapatan rendah, tetapi juga banyak hal lain, seperti: tingkat

kesehatan, pendidikan rendah, perlakuan tidak adil dalam hukum, kerentanan terhadap ancaman tindak kriminal, ketidakberdayaan menghadapi kekuasaan, dan ketidakberdayaan dalam menentukan jalan hidupnya sendiri (Chambers dalam Nasikun; 2001).

Todaro (2000) menyatakan bahwa variasi kemiskinan di negara berkembang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: (1) perbedaan geografis, jumlah penduduk dan tingkat pendapatan, (2) perbedaan sejarah, sebagian dijajah oleh negara yang berlainan, (3) perbedaan kekayaan sumberdaya alam dan kualitas sumberdaya manusia, (4) perbedaan peranan sektor swasta dan negara, (5) perbedaan struktur industri, (6) perbedaan derajat ketergantungan pada kekuatan ekonomi dan politik negara lain, dan (7) perbedaan pembagian kekuasaan, struktur politik dan kelembagaan dalam negeri.

Sharp (1996) dalam Mudrajad Kuncoro (1997) mencoba mengidentifikasi penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi:

1. Secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumberdaya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumberdaya dalam jumlah terbatas dan kualitas yang rendah.
2. Kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumberdaya manusia. Kualitas sumberdaya manusia yang rendah mengindikasikan produktifitas yang rendah, pada akhirnya berimplikasi pada upah yang rendah. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia dikarenakan oleh rendahnya

pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi, dan keturunan.

3. Kemiskinan muncul diakibatkan perbedaan akses dalam modal.

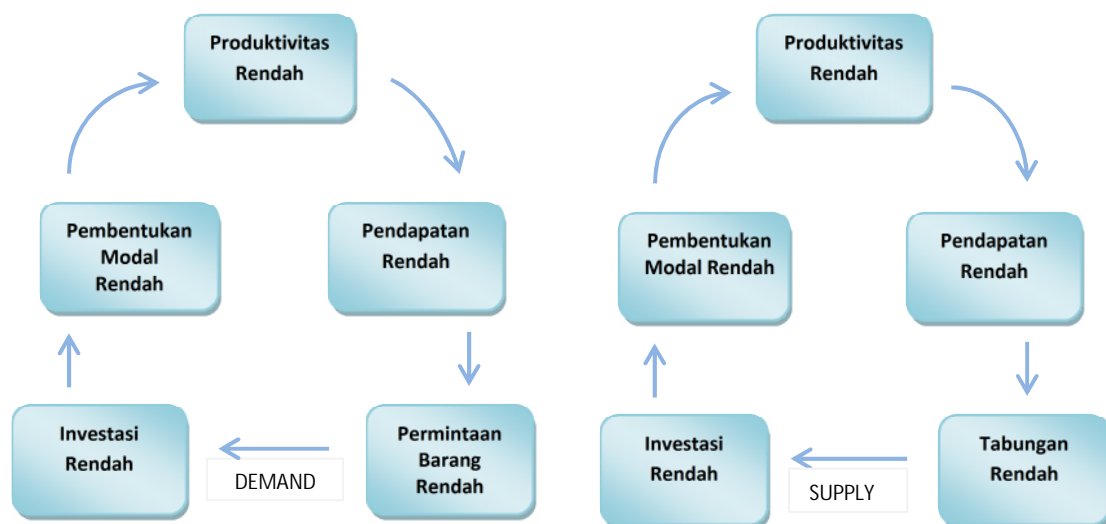
### 2.1.2 Teori dan Ukuran Kemiskinan

Ketiga penyebab kemiskinan di atas bermuara pada teori lingkaran kemiskinan (*vicious circle of poverty*) oleh Ragnar Nurkse (1953) (dalam Jhingan, 2010). Yang dimaksud lingkaran kemiskinan adalah suatu lingkaran rangkaian yang saling mempengaruhi satu sama lain sedemikian rupa, sehingga menimbulkan suatu keadaan dimana negara akan tetap miskin dan akan banyak mengalami kesukaran untuk mencapai tingkat pembangunan yang lebih baik. Adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktifitas. Rendahnya produktifitas mengakibatkan rendahnya pendapatan yang mereka terima. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi, baik investasi manusia maupun investasi modal. Rendahnya investasi berakibat pada keterbelakangan dan seterusnya.

Menurut Nurkse ada dua lingkaran perangkap kemiskinan, yaitu dari sisi penawaran (*supply*) dimana tingkat pendapatan masyarakat yang rendah diakibatkan oleh tingkat produktivitas yang rendah menyebabkan kemampuan masyarakat untuk menabung rendah. Kemampuan untuk menabung yang rendah menyebabkan tingkat pembentukan modal rendah, tingkat pembentukan modal (investasi) yang rendah menyebabkan kekurangan modal, dan dengan demikian tingkat produktivitasnya juga

rendah dan seterusnya. Dari sisi permintaan (*demand*), di negara-negara miskin kemampuan untuk menanam modal sangat rendah, hal ini dikarenakan luas pasar untuk berbagai jenis barang terbatas yang disebabkan oleh pendapatan masyarakat yang sangat rendah. Rendahnya pendapatan masyarakat dikarenakan tingkat produktivitasnya yang rendah, sebagai wujud dari tingkat pembentukan modal yang terbatas di masa lalu. Pembentukan modal yang terbatas disebabkan kurangnya perangsang untuk menanamkan modal dan seterusnya.

**Gambar 2.1**  
**Lingkaran Kemiskinan (*Vicious Circle Nurkse*)**



Sumber: Jhingan, 2010

Dalam mengukur tingkat kemiskinan di suatu wilayah, pada umumnya terdapat dua indikator yaitu tingkat kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Mengukur kemiskinan dengan mengacu pada garis kemiskinan disebut kemiskinan absolut, sedang konsep kemiskinan yang pengukurannya tidak didasarkan pada garis kemiskinan disebut kemiskinan relatif (Tambunan, 2001).

## 1. Kemiskinan Absolut

Kemiskinan absolut merupakan ketidakmampuan seseorang dengan pendapatan yang diperoleh untuk mencukupi kebutuhan dasar minimum yang diperlukan untuk hidup sehari-hari. Kebutuhan minimum tersebut diterjemahkan dalam ukuran finansial (uang). Nilai minimum tersebut digunakan sebagai batas garis kemiskinan. Garis kemiskinan ditetapkan pada tingkat konstan secara riil, sehingga dapat ditelusuri kemajuan yang diperoleh dalam menanggulangi kemiskinan pada level absolut sepanjang waktu.

Metode yang digunakan BPS dalam mengukur tingkat kemiskinan dengan menggunakan pendekatan pemenuhan kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini dapat dihitung *Headcount Index*, yaitu persentase penduduk miskin terhadap total penduduk. Nilai garis kemiskinan yang digunakan mengacu pada kebutuhan minimum 2.100 kkal per kapita per hari ditambah dengan kebutuhan minimum non makanan yang merupakan kebutuhan dasar seseorang meliputi kebutuhan papan, sandang, sekolah, transportasi, serta kebutuhan rumah tangga dan individu yang mendasar lainnya. Besarnya nilai pengeluaran (dalam rupiah) untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut disebut garis kemiskinan. Menurut BPS batas garis kemiskinan kota dan desa di Indonesia untuk tahun 2010 adalah 211.726 rupiah.

## 2. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif ditentukan berdasar pada ketidakmampuan untuk mencapai standar hidup yang ditetapkan masyarakat setempat sehingga proses penentuannya sangat subyektif. Mereka yang berada di bawah standar penilaian tersebut dikategorikan sebagai miskin secara relatif. Kemiskinan relatif ini digunakan untuk mengukur ketimpangan distribusi pendapatan.

BKKBN menggunakan ukuran kemiskinan relatif ini dan mendefinisikannya dalam pengertian Pembangunan Keluarga Sejahtera yang terdiri atas keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I. Keluarga pra sejahtera adalah keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, seperti kebutuhan spiritual, pangan, sandang, papan, kesehatan, dan keluarga berencana. Sedangkan keluarga sejahtera I adalah keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan sosial dan psikologis, kebutuhan pendidikan, interaksi dalam keluarga, interaksi dengan lingkungan tempat tinggal, dan transportasi.

Berdasarkan penelitian tentang kemiskinan nasional, May dkk (2005) menemukan percampuran antara tiga pendekatan yang lazim digunakan:

1. Kemiskinan yang dipahami sebagai ketidak mampuan untuk memperoleh standar minimal penghasilan yang tercermin oleh indikator kemiskinan yang dapat dihitung dan bersifat mutlak.

Pengukuran kebutuhan diukur secara kuantitatif dan mengandalkan survei-survei tentang pendapatan dan konsumsi.

2. Kemiskinan yang dipahami sebagai kurangnya sumberdaya untuk memperoleh jenis diet atau gaya hidup yang dapat diterima secara sosial. Pendekatan ini menekankan pada indikator relatif yang bervariasi menurut standar masyarakat yang akan diukur, dan mungkin juga mempertimbangkan masalah distribusi. Pengukuran biasanya kuantitatif, walaupun pendekatan yang seringkali subyektif atau kualitatif mungkin memainkan peran dalam menetapkan definisi dan standar kemiskinan.
3. Kemiskinan yang dipahami sebagai ketidak mampuan untuk melakukan pilihan-pilihan, ketidak-mampuan untuk memenuhi kebutuhan, dan pengucilan sosial. Pengukurannya merupakan hal yang rumit, dan tidak ada pendekatan yang diterima secara umum yang digunakan walaupun lembaga seperti UNDP telah memulai meneliti metodologi alternatif. Teknik penelitian kualitatif dan partisipatif seringkali memainkan peranan inti.

### **2.1.3 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

Kuncoro (2001) menyatakan bahwa pendekatan pembangunan tradisional lebih dimaknai sebagai pembangunan yang lebih memfokuskan pada peningkatan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) suatu provinsi, kabupaten, atau kota. Sedangkan pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari pertumbuhan angka PDRB. Pertumbuhan ekonomi juga diartikan sebagai kenaikan PDB/PNB tanpa

memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak (Lincoln Arsyad, 1999).

Penggunaan PDRB sebagai variabel independen yang mempengaruhi kemiskinan dikarenakan angka PDRB dapat menunjukkan nilai tambah yang dihasilkan dalam suatu wilayah tanpa memandang tingkat pendapatan tiap-tiap golongan, sehingga PDRB berlaku secara menyeluruh. Sementara PDRB per kapita hanya mengukur golongan pendapatan tertentu di wilayah tertentu, sehingga dalam menganalisis kemiskinan hanya terbatas pada golongan pendapatan tertentu saja.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut BPS didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. Cara perhitungan PDRB dapat diperoleh melalui tiga pendekatan (Robinson Tarigan, 2008), yaitu:

1. Pendekatan Produksi

Pendekatan ini menghitung nilai tambah dari barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu kegiatan ekonomi di daerah tersebut dikurangi biaya antar masing-masing total produksi bruto tiap kegiatan subsektor atau sektor dalam jangka waktu tertentu. Nilai tambah merupakan selisih antara nilai produksi dan nilai biaya antara yaitu bahan baku/penolong dari luar yang dipakai dalam proses produksi.

2. Pendekatan Pendapatan

Pendekatan ini nilai tambah dari setiap kegiatan ekonomi diperkirakan dengan menjumlahkan semua balas jasa yang diterima faktor produksi, yaitu upah, gaji, dan surplus usaha, penyusutan, pajak tidak langsung neto pada sektor pemerintah dan usaha yang sifatnya tidak mencari untung, surplus usaha tidak diperhitungkan. Surplus usaha meliputi bunga yang dibayarkan neto, sewa tanah, dan keuntungan.

### 3. Pendekatan Pengeluaran

Pendekatan ini menjumlahkan nilai penggunaan akhir dari barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri. Jika dilihat dari segi penggunaan maka total penyediaan/produksi barang dan jasa itu digunakan untuk konsumsi rumah tangga, konsumsi lembaga swasta yang tidak mencari untung, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto (investasi), perubahan stok, dan ekspor neto.

Menurut BPS, cara penyajian Produk Domestik Regional Bruto disusun dalam dua bentuk, yaitu:

#### 1. Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan

Jumlah nilai produksi atau pengeluaran atau pendapatan yang dihitung menurut harga tetap. Dengan cara meniai kembali atau mendefinisikan berdasarkan harga-harga pada tingkat dasar dengan menggunakan indeks harga konsumen. Dari perhitungan ini tercermin tingkat kegiatan ekonomi yang sebenarnya melalui PDRB riilnya.

#### 2. Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku

Jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Yang dimaksud nilai tambah yaitu nilai yang ditambahkan kepada barang dan jasa yang dipakai oleh unit produksi dalam proses produksi sebagai input antara. Nilai yang ditambahkan ini sama dengan balas jasa atas ikut sertanya faktor produksi dalam proses produksi.

Rahardjo Adisasmita (2011) berpendapat bahwa indikator yang dipergunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah tingkat pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Alasan yang mendasari pemilihan PDRB sebagai suatu indikator mengukur pertumbuhan ekonomi adalah:

1. PDRB adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh aktivitas produksi di dalam perekonomian daerah. Hal ini berarti peningkatan PDRB mencerminkan pula peningkatan balas jasa kepada faktor produksi yang digunakan dalam aktivitas produksi tersebut.
2. PDRB dihitung atas dasar konsep arus barang, artinya perhitungannya PDRB hanya mencakup nilai produk yang dihasilkan pada suatu periode tertentu. Aliran konsep ini memungkinkan kita untuk membandingkan jumlah output yang dihasilkan pada tahun ini dengan tahun sebelumnya.
3. Batas wilayah perhitungan PDRB adalah daerah (perekonomian domestik). Hal ini memungkinkan untuk mengukur sejauh mana kebijakan-kebijakan ekonomi yang diterapkan pemerintah mampu mendorong aktivitas perekonomian domestik.

Untuk menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi, data PDRB adalah data PDRB atas dasar harga konstan, artinya pertumbuhan PDRB mencerminkan pertumbuhan output yang dihasilkan perekonomian dalam periode tertentu.

#### **2.1.4 Pengangguran**

Pengangguran menimbulkan berbagai masalah ekonomi dan sosial bagi yang mengalaminya. Ketiadaan pendapatan menyebabkan para penganggur harus mengurangi pengeluaran konsumsinya. Apabila pengangguran di suatu negara sangat buruk, kekacauan politik dan sosial selalu berlaku dan menimbulkan efek yang buruk bagi kesejahteraan masyarakat dan prospek pembangunan ekonomi dalam jangka panjang (Sadono Sukirno, 2004).

Dalam standar pengertian yang sudah ditentukan secara internasional, yang dimaksudkan dengan pengangguran adalah seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkannya (Sadono Sukirno, 2004). Sedangkan menurut BPS (2008), pengangguran adalah sejumlah orang yang masuk dalam angkatan kerja (usia 15 tahun ke atas) yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya.

Sadono Sukirno (2000), membedakan pengangguran kedalam beberapa jenis, yaitu:

1) Jenis-jenis Pengangguran Berdasarkan Penyebabnya:

a. Pengangguran Alamiah

Pengangguran yang berlaku pada tingkat kesempatan kerja penuh.

Kesempatan kerja penuh adalah keadaan dimana sekitar 95 persen dari

angkatan kerja dalam suatu waktu sepenuhnya bekerja. Pengangguran sebanyak lima persen inilah yang dinamakan sebagai pengangguran alamiah.

b. Pengangguran Friksional

Jenis pengangguran yang disebabkan oleh tindakan seseorang pekerja untuk meninggalkan pekerjaannya dan mencari kerja yang lebih baik atau lebih sesuai dengan keinginannya.

c. Pengangguran Struktural

Pengangguran yang diakibatkan oleh pertumbuhan ekonomi. Tiga sumber utama yang menjadi penyebab berlakunya pengangguran struktural adalah:

- 1) Perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi yang semakin maju membuat permintaan barang dari industri yang memproduksi barang-barang kuno menurun dan akhirnya tutup sehingga pekerja di industri ini menganggur.
- 2) Kemunduran yang disebabkan oleh adanya persaingan dari luar negeri atau daerah lain. Pesaing dari luar negeri yang mampu menghasilkan produk yang lebih baik dan lebih murah akan membuat permintaan barang lokal menurun. Industri lokal yang tidak mampu bersaing akan bangkrut sehingga timbul pengangguran.
- 3) Kemunduran perkembangan ekonomi satu kawasan sebagai akibat dari pertumbuhan pesat dikawasan lain.

d. Pengangguran Konjungtur

Pengangguran yang melebihi pengangguran alamiah. Pada umumnya pengangguran konjungtur berlaku sebagai akibat pengurangan dalam permintaan agregat. Penurunan permintaan agregat mengakibatkan perusahaan mengurangi jumlah pekerja atau gulung tikar, sehingga muncul pengangguran konjungtur.

2) Jenis-Jenis Pengangguran Berdasarkan Cirinya:

a. Pengangguran Terbuka

Pengangguran ini tercipta sebagai akibat penambahan pertumbuhan kesempatan kerja yang lebih rendah dari pada pertumbuhan tenaga kerja, akibat banyaknya tenaga kerja yang tidak memperoleh pekerjaan. Menurut BPS, pengangguran terbuka adalah penduduk yang telah masuk dalam angkatan kerja tetapi tidak memiliki pekerjaan sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, serta sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

b. Pengangguran Tersembunyi

Keadaan dimana suatu jenis kegiatan ekonomi dijalankan oleh tenaga kerja yang jumlahnya melebihi dari yang diperlukan. Sehingga apabila sejumlah besar dari mereka berpindah sektor pekerjaan, hasil sektor pekerjaan yang ditinggalkannya tidak akan berkurang walaupun tidak diadakan penggantian modal yang berarti.

c. Pengangguran Musiman

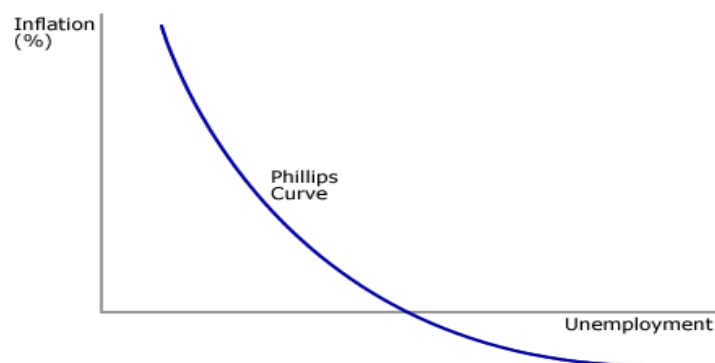
Keadaan pengangguran pada masa-masa tertentu dalam satu tahun. Pengangguran ini biasanya terjadi di sektor pertanian. Petani akan menganggur saat menunggu masa tanam dan saat jeda antara musim tanam dan musim panen.

d. Setengah Menganggur

Keadaan dimana seseorang bekerja dibawah jam kerja normal. Menurut BPS, di Indonesia jam kerja normal adalah 35 jam seminggu, jadi pekerja yang bekerja di bawah 35 jam seminggu masuk dalam golongan setengah menganggur.

Sejak lama ahli-ahli ekonomi telah menyadari bahwa apabila tingkat pengangguran rendah, masalah inflasi akan dihadapi; makin rendah tingkat pengangguran, makin tinggi tingkat inflasi. Sebaliknya apabila terdapat masalah pengangguran, makin tinggi tingkat inflasi. Sebaliknya apabila terdapat masalah pengangguran yang serius, tingkat harga-harga adalah relatif stabil. Keterkaitan di antara tingkat inflasi upah (tingkat kenaikan upah) dan pengangguran dijelaskan melalui Kurva Phillips (Sadono Sukirno, 2000).

**Gambar 2.2**  
**Kurva Phillips (Inflasi dan Pengangguran)**



*Sumber: Sadono Sukirno, 2000*

Kurva Phillips menggambarkan keterkaitan antara inflasi dengan tingkat pengangguran. Sifat umum dari kurva Phillips ialah pada mulanya penurunannya adalah sangat curam, tetapi semakin lama akan semakin landai. Semakin tinggi tingkat pengangguran semakin rendah laju inflasi. Kurva ini menandakan bahwa tingkat pengangguran yang rendah akan selalu dapat dipertahankan dengan mendorong sedikit laju inflasi. Laju inflasi akan selalu dapat diturunkan dengan membiarkan terjadinya kenaikan angka pengangguran atau dengan kata lain terjadi *trade off* antara inflasi dengan tingkat pengangguran.

### 2.1.5 Inflasi

Boediono (1996) mendefinisikan inflasi sebagai kecenderungan dari harga-harga untuk naik secara umum dan terus-menerus. Inflasi juga diartikan sebagai suatu keadaan yang mengindikasikan semakin melemahnya daya beli yang diikuti dengan semakin merosotnya nilai riil (intrinsik) mata uang suatu negara (Khalwaty, 2000). Inflasi dalam perekonomian disatu sisi selalu menjadi hal yang relatif menakutkan, karena inflasi dapat melemahkan daya beli dan dapat melumpuhkan kemampuan produksi yang mengarah pada krisis produksi dan konsumsi. Akan tetapi, disisi lain ketiadaan inflasi menandakan tidak adanya pergerakan positif dalam perekonomian karena relatif harga-harga tidak berubah dan kondisi ini dapat melemahkan sektor industri.

Sehubungan dengan kompleksnya faktor yang menjadi sumber terjadinya inflasi atau banyaknya variabel yang berpengaruh terhadap inflasi, maka dapat pula dilakukan pengelompokan terhadap macam-macam inflasi berdasar berbagai sudut pandang, menurut Samuelson (1992) dan Khalwaty (2000):

1) Berdasarkan Bobotnya:

a) *Creeping Inflation*

Inflasi ringan adalah inflasi dengan laju pertumbuhan yang berlangsung secara perlahan dan berada pada posisi satu digit atau dibawah 10% per tahun.

b) *Moderate Inflation*

Inflasi sedang ialah inflasi dengan aju tingkat pertumbuhan berada diantara 10-30% per tahun atau melebihi dua digit dan sangat mengancam struktur dan pertumbuhan ekonomi di suatu negara.

c) *Galloping Inflation*

Inflasi pada tingkat ini terjadi pada tingkatan 30% sampai dengan 100% per tahun. Dalam kondisi seperti ini orang hanya memegang uang sejumlah yang diperlukan saja dan lebih cenderung menyimpan kekayaannya dalam bentuk aset riil.

d) *Hyper Inflation*

Inflasi yang sangat berat ialah inflasi dengan laju pertumbuhan melampaui 100% per tahun.

2) Berdasarkan Penyebabnya

a) *Natural Inflation dan Hman Error Inflation*

*Natural inflation* adalah jenis inflasi yang terjadi karena pengaruh alamiah dimana manusia tidak memiliki kekuasaan untuk mencegahnya, sedangkan *Human Error Inflation* adalah jenis inflasi yang terjadi karena kesalahan yang dilakukan oleh manusia sendiri.

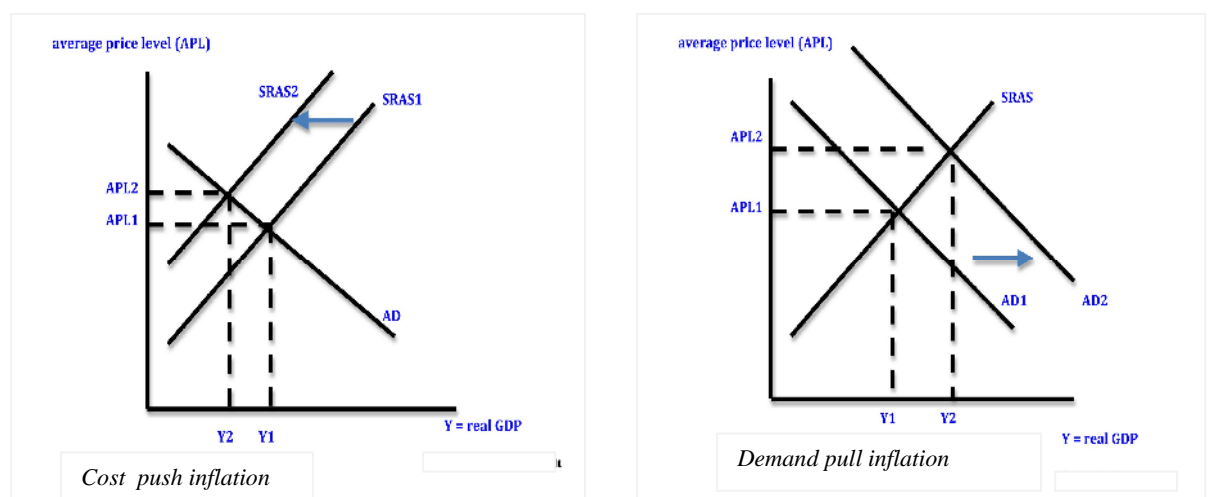
b) *Expected Inflation dan Unexpected Inflation*

Pada *Expected Inflation* tingkat suku bunga pinjaman riil akan sama dengan tingkat suku bunga pinjaman nominal dikurangi inflasi, sedangkan pada *Unexpected Inflation* suku bunga pinjaman nominal merefleksikan kompensasi terhadap efek inflasi.

c) *Demand Pull dan Cost Push Inflation*

*Demand pull inflation* diakibatkan oleh perubahan-perubahan yang terjadi pada sisi permintaan agregatif dari barang dan jasa pada suatu perekonomian, ada kecenderungan GDP riil naik bersama dengan kenaikan harga umum. *Cost push inflation* adalah inflasi yang terjadi karena adanya perubahan-perubahan pada sisi penawaran agregatif dan dari barang dan jasa pada suatu perekonomian, umumnya kenaikan harga dibarengi dengan penurunan omzet penjualan.

**Gambar 2.3**  
*Cost Push Inflation dan Demand Pull Inflation*



Sumber: Boediono, 1982

d) *Spiralling Inflation*

Inflasi jenis ini adalah inflasi yang diakibatkan oleh inflasi yang terjadi sebelumnya, yang mana inflasi sebelumnya itu terjadi sebagai akibat dari inflasi yang terjadi sebelumnya lagi dan begitu seterusnya.

e) *Imported Inflation dan Domestic Inflation*

*Imported inflation* bisa dikatakan adalah inflasi di negara lain yang ikut dialami oleh suatu negara karena harus menjadi price taker dalam pasar perdagangan internasional. *Domestic inflation* dapat dikatakan sebagai inflasi yang hanya terjadi di dalam negeri suatu negara, yang tidak begitu mempengaruhi negara-negara lainnya.

Terdapat beberapa teori yang berkembang dalam menjelaskan penyebab timbulnya inflasi, yaitu:

1) Teori Kuantitas

Teori ini menekankan pada peranan jumlah uang beredar dan harapan (ekspektasi) masyarakat mengenai kenaikan harga terhadap timbulnya inflasi. Inti dari teori ini adalah: (1) Inflasi hanya bisa terjadi jika terdapat penambahan volume uang beredar, baik uang kartal maupun giral, (2) Laju inflasi juga ditentukan oleh laju pertumbuhan jumlah uang beredar dan oleh harapan (ekspektasi) masyarakat mengenai kenaikan harga di masa mendatang.

2) Keynesian Model

Dasar pemikiran model inflasi dari Keynes ini, bahwa inflasi terjadi karena masyarakat ingin hidup diluar batas kemampuan

ekonominya, sehingga menyebabkan permintaan efektif masyarakat terhadap barang-barang (permintaan agregat) melebihi jumlah barang-barang yang tersedia (penawaran agregat), akibatnya akan terjadi *inflationary gap*. Keterbatasan jumlah persediaan barang ini terjadi karena dalam jangka pendek kapasitas produksi tidak dapat dikembangkan untuk mengimbangi kenaikan permintaan agregat. Oleh karenanya sama seperti pandangan kaum moneteris, Keynesian model ini lebih banyak dipakai untuk menerangkan fenomena inflasi dalam jangka pendek.

Khalwaty (2000) mengatakan bahwa laju pertumbuhan inflasi harus selalu diwaspadai dan dikendalikan karena:

- a. Inflasi berdampak luas terhadap berbagai sektor kehidupan, sehingga perlu dicermati terutama oleh para praktisi ekonomi dan bisnis.
- b. Inflasi yang tinggi mempunyai pengaruh agregatif terhadap perekonomian makro sebagai faktor eksternal dunia industri serta berdampak luas pula terhadap sektor perekonomian mikro yang merupakan faktor internal dunia bisnis.
- c. Industri yang berorientasi ekspor akan semakin kurang kompetitif di pasar bahkan di pasar nasional bila inflasi tinggi. Biaya faktor industri semakin mahal hingga menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- d. Kemerosotan produksi baik yang berorientasi pada ekspor maupun pasar domestik akan meningkatkan laju pertumbuhan angka pengangguran yang sangat berbahaya bagi stabilisasi perekonomian negara.

- e. Inflasi yang tinggi akan melemahkan daya beli masyarakat terutama terhadap produksi dalam negeri yang selanjutnya dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap nilai mata uang nasional.
- f. Inflasi yang tinggi akan semakin menumbuhkan suburkan korupsi, manipulasi dan kolusi di kalangan elit pemerintahan dengan kalangan konglomerat yang membuat kepercayaan terhadap pemerintah merosot.
- g. Inflasi yang tinggi akan mendorong pemodal nasional untuk menanamkan modalnya ke luar negeri dan bahkan pengusaha menglokasikan industri ke luar negeri yang perekonomiannya lebih stabil.

Badan Pusat Statistik Indonesia, menggunakan salah satu metode dalam pengukuran tingkat inflasi ialah dengan IHK (Indeks Harga Konsumen). IHK merupakan salah satu indikator ekonomi yang memberikan informasi mengenai harga barang dan jasa yang dibayar oleh konsumen. Perhitungan IHK dilakukan untuk merekam perubahan harga beli di tingkat konsumen (*purchasing cost*) dari sekelompok tetap barang dan jasa (*fixed basket*) yang pada umumnya dikonsumsi masyarakat. Mulai Juni 2008 hingga saat ini, data IHK mencakup 66 kota di seluruh Indonesia meliputi 774 komoditas barang dan jasa (284 – 441 komoditas barang dan jasa per kota).

Teknis kompilasi yang dipergunakan dalam perhitungan IHK adalah:

1. IHK dihitung menggunakan metode *Modified Laspeyres* dengan

$$\text{rumus: } I_n = \frac{\sum_{i=1}^k \frac{P_{ni}}{P_{(n-1)i}} (P_{(n-1)i} \cdot Q_{oi})}{\sum_{i=1}^k P_{oi} \cdot Q_{oi}} \times 100$$

Dimana:  $I_n$  = indeks bulan ke-n  
 $P_{ni}$  = harga komoditi i pada bulan ke-n  
 $P_{(n-1)i}$  = harga jenis komoditi i pada bulan ke-n-1  
 $P_{(n-1)i} \cdot Q_{0i}$  = nilai konsumsi jenis komoditi i bulan ke n-1  
 $P_{0i} Q_{0i}$  = nilai konsumsi jenis komoditi i pada tahun dasar

2. Persentase perubahan IHK secara tahunan (*year on year*) bulan ke-n dihitung dengan metode *point-to-point* dengan dasar IHK bulan yang sama tahun sebelumnya (t-1), dengan rumus:

$$IHK \text{ year - on - year} = \left[ \frac{I_{nt}}{I_{n(t-1)}} - 1 \right] \times 100$$

Dimana:  $I_{tn}$  = IHK bulan ke-n tahun ke-t

$I_{t(n-1)}$  = IHK bulan ke-n tahun ke-(t-1)

### 2.1.6 Perkotaan dan Aglomerasi

Umum diketahui bahwa dalam suatu wilayah terdapat tempat-tempat dimana penduduk atau kegiatan terkonsentrasi dan terdapat pula tempat yang kurang terkonsentrasi. Tempat terkonsentrasinya penduduk dan kegiatannya dinamakan dengan berbagai istilah, yaitu kota, pusat perdagangan, pusat industri, pusat pertumbuhan, simpul distribusi, atau daerah nodal. Masing-masing istilah itu bergantung dengan asosiasi pikiran masing-masing individu tentang fungsi apa yang hendak ditonjolkan atas tempat-tempat konsentrasi tersebut.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 2008 tentang tata ruang wilayah nasional, yang dimaksudkan dengan kawasan perkotaan adalah wilayah

yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. kawasan metropolitan adalah kawasan perkotaan yang terdiri atas sebuah kawasan perkotaan yang berdiri sendiri atau kawasan perkotaan inti dengan kawasan-kawasan perkotaan di sekitarnya yang saling memiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi dengan jumlah penduduk secara keseluruhan sekurang-kurangnya satu juta jiwa. Kawasan mega politan ialah kawasan yang terbentuk dari dua atau lebih kawasan metropolitan yang memiliki hubungan fungsional dan membentk sebuah sistem.

Dalam menetapkan apakah suatu konsentrasi pemukiman sudah dapat dikategorikan sebagai suatu kota atau belum, perlu ada kriteria yang jelas untuk membedakannya. Badan Pusat Statistik (BPS), dalam pelaksanaan survei status desa/kelurahan yang dilakukan pada tahun 2000, menggunakan beberapa kriteria untuk menetapkan apakah suatu desa/kelurahan dikategorikan sebagai desa atau sebagai kota. Kriteria yang digunakan adalah; (1) kepadatan penduduk per km<sup>2</sup>, (2) persentase rumah tangga yang mata pencaharian utamanya pertanian atau nonpertanian, (3) persentase rumah tangga yang memiliki telepon, (4) persentase rumah tangga yang menjadi pelanggan listrik, (5) fasilitas umum yang ada, seperti: fasilitas pendidikan, pasar, tempat hiburan, kompleks pertokoan, dan fasilitas lain seperti hotel, bilyar, diskotik, karaoke, panti pijat, dan salon.

Kriteria BPS hanya berdasarkan atas kondisi (besaran) fisik dan tidak dilengkapi dengan melihat apakah tempat konsentrasi itu menjalankan fungsi

perkotaan. Tarigan (2008) berpendapat untuk melihat apakah suatu konsentrasi digolongkan sebagai kota atau tidak, adalah dari seberapa banyak fasilitas perkotaan yang tersedia dan seberapa jauh kota itu menjalankan fungsi perkotaan.

Fasilitas atau fungsi perkotaan antara lain adalah:

- 1) Pusat perdagangan, yang tingkatan yang dapat dibedakan atas melayani kota itu sendiri, melayani masyarakat kota dan daerah pinggiran, melayani beberapa kota kecil, melayani pusat provinsi atau pusat perdagangan antar pulau/ekspor di provinsi tersebut dan pusat perdagangan beberapa provinsi sekaligus.
- 2) Pusat pelayanan jasa, baik jasa perorangan maupun jasa perusahaan.
- 3) Tersedianya prasarana perkotaan, seperti sistem jalan kota yang baik, jaringan listrik, jaringan telepon, air minum, pelayanan sampah, drainase, taman kota, dan pasar.
- 4) Pusat penyedia fasilitas sosial seperti prasarana pendidikan.
- 5) Pusat pemerintahan, banyak kota yang sekaligus merupakan pusat pemerintahan.
- 6) Pusat komunikasi dan pangkalan transportasi, artinya dari kota tersebut masyarakat dapat berhubungan ke banyak tujuan dengan banyak pilihan alat penghubung.
- 7) Lokasi pemukiman yang tertata, suatu lokasi dikatakan kota karena penduduknya yang banyak dan lokasi pemukiman yang teratur dan tertata.

Terdapat beberapa definisi kota yang dipandang dari berbagai aspek.

Secara *administratif*, kota didefinisikan sebagai wilayah kewenangan dengan

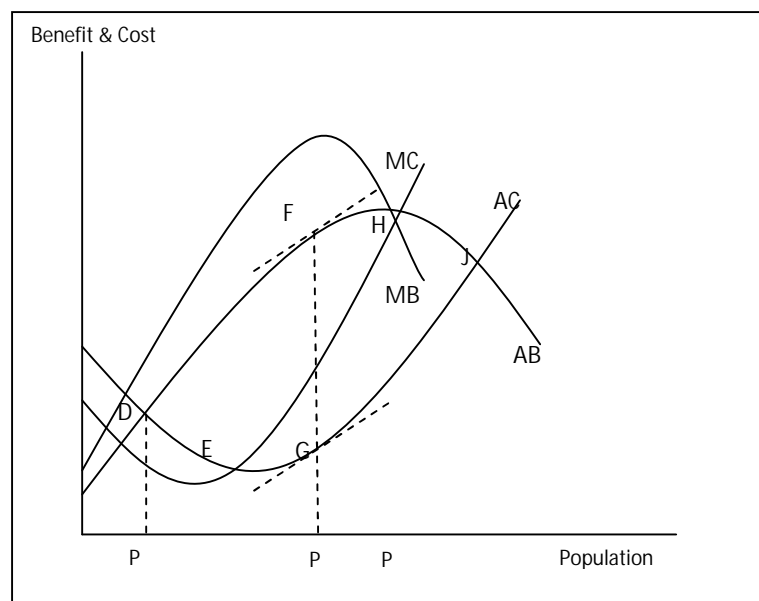
batas wilayah administrasi yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan. Dari aspek *funksional* kota diartikan sebagai pemusatan beberapa kegiatan fungsional, dengan penekanan pada fungsi jasa koneksi, distribusi, dan produksi non pertanian, oleh karenanya pasar dan jasa perangkutan menjadi ciri utama suatu kota. *Sosial ekonomi*, kota merupakan konsentrasi penduduk dengan dominasi kegiatan usaha di sektor non pertanian yang heterogen. Dari sisi *sosial budaya*, kota merupakan pusat perubahan budaya yang dapat mempengaruhi pola nilai budaya yang ada. Secara *fisik*, kota merupakan suatu lingkungan terbangun (*built up area/enviroment*) yang didominasi oleh struktur fisik binaan bukan alami. Secara *geografis*, kota merupakan pemusatan penduduk dan kegiatan usaha yang secara geografis akan menempatkan dirinya pada lokasi yang strategis secara ekonomi, sosial, maupun fisik. Dari aspek *demografis*, kota adalah tempat dimana terdapat konsentrasi penduduk yang besarnya ditentukan berdasarkan batasan statistik tertentu. Secara umum, kota (*city*) adalah pusat pemukiman dan kegiatan penduduk yang memiliki batasan wilayah administratif yang diatur dalam peraturan perundangan, serta pemukiman yang telah memperlihatkan watak dan ciri kehidupan kota. Sedangkan perkotaan (*urban area*), ialah kawasan dengan kepadatan populasi yang tinggi yang memiliki suasana kehidupan dan penghidupan kota (Hendarto, 2010).

Keuntungan berlokasi pada tempat yang terkonsentrasi disebabkan faktor skala ekonomi (*economic of scale*) dan aglomerasi ekonomi. *Economic of scale* adalah keuntungan karena dapat memproduksi berdasarkan spesialisasi sehingga produksi lebih besar dan biaya per unitnya lebih efisien. Sedangkan aglomerasi

ekonomi ialah keuntungan karena di tempat itu terdapat berbagai keperluan dan fasilitas yang dapat digunakan oleh perusahaan (Tarigan, 2008).

Richardson (1978), berusaha untuk mengkaji bagaimana biaya dan manfaat bervariasi dengan ukuran kota dengan mensyaratkan kondisi optimal dimana manfaat yang ditimbulkan sama dengan biaya yang dikeluarkan ( $MC=MB$ ). Manfaat yang dimaksudkan disini ialah jumlah populasi yang banyak dan biayanya ialah penyediaan sarana dan prasarana. *Optimal city size* gugur dalam konteks sistem perkotaan nasional, hal ini dikarenakan kondisi akan optimal jika wilayah kota diatur oleh sistem administrasi kota, tetapi ada wilayah disekeliling kota yang mempengaruhi perkembangan kota. Suatu kota akan optimum jika kota tersebut berdiri sendiri tanpa wilayah di sekelilingnya.

**Gambar 2.4**  
***The Theory of City Size***



Sumber: Richardson, 1978

Pada titik H, merupakan perencanaan sosial yang optimum untuk ukuran suatu kota, mengasumsi bahwa *opportunity cost* dari lokasi marginal menaikkan populasi di bawah P adalah 0.  $MC=MB$  (*total net benefit*) menunjukkan ukuran maksimalis kota. Walaupun begitu, salah satu permasalahannya adalah bahwa migran mungkin mendasarkan pilihan lokasi mereka dalam gap diantara AB dan AC, kondisi ini mungkin akan terus berlanjut tertarik ke dalam kota sepanjang  $AC-AB>0$ . Jika ini merupakan suatu kasus, *market equilibrium* akan tercapai pada titik J  $AC=AB$ .

Ekonomi aglomerasi mengacu pada eksternalitas positif yakni perusahaan manfaat dari lokasi dekat satu sama lain dan karena itu dapat menghasilkan barang atau jasa lebih rendah dari biaya rata-rata. Secara luas ada dua jenis ekonomi aglomerasi: ekonomi lokalisasi dan ekonomi urbanisasi. Dalam ekonomi urbanisasi, biaya produksi perusahaan, terutama yang berhubungan dengan industri, jasa dan kegiatan lainnya menurun sebagai ukuran meningkatnya output industri. Ekonomi lokalisasi secara internal untuk industri tertentu dan menjelaskan pembentukan kawasan industri khusus dimana perusahaan yang beroperasi di sektor-sektor tertentu mendapatkan keuntungan dengan menempatkan atau *clustering* sekitar produsen yang sama (*World bank*, 2012).

Penelitian *World bank* (2012) menentukan daerah-daerah metropolitan, dengan menggunakan metode yang dikembangkan oleh Uchida dan Nelson (2008), dimodifikasi untuk penerapan dengan konteks Indonesia. Ukuran aglomerasi berbasis urbanisasi menggunakan tiga faktor untuk menentukan daerah perkotaan: ukuran sebuah pusat perkotaan, kepadatan penduduk, dan jarak dari

kabupaten ke pusat kota. Langkah-langkah ini membentuk dasar bagi *Agglomeration Index* (AI) yang pada dasarnya adalah perkiraan wilayah metropolitan baik kota dan kabupaten pinggiran kota dengan kepadatan penduduk tinggi dan dekat dengan pusat kota (berdasarkan waktu Komuter).

Metode Uchida dan Nelson merupakan suatu pembuktian yang bagus. Walaupun demikian, metode tersebut disusun untuk konteks secara internasional, sehingga diperlukan penyesuaian untuk kondisi di Indonesia. Modifikasi tersebut antara lain: (1) Populasi minimum dengan kepadatan 710 orang per kilometer persegi untuk Jawa-Bali dan kepadatan 150 orang per kilometer persegi untuk daerah lainnya. (2) Maksimum waktu tempuh perjalanan dari pusat kota 90 menit untuk Jakarta dan Surabaya, dan 60 menit untuk kota lainnya. Dengan menggunakan data BPS tahun 2007, telah teridentifikasi 44 aglomerasi dengan beberapa diantaranya terdiri dari satu kota dan beberapa dengan satu atau lebih kota inti multi-distrik wilayah metropolitan.

## **2.2 Pengaruh Variabel Independen terhadap Variabel Dependen**

### **2.2.1 Pengaruh PDRB terhadap Jumlah Penduduk Miskin**

Sadono Sukirno (2000) berpendapat laju pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan PDRB tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil. Selanjutnya, pembangunan ekonomi tidak semata-mata diukur berdasarkan pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB) secara keseluruhan, tetapi harus memperhatikan sejauh mana distribusi pendapatan telah menyebar ke lapisan masyarakat serta siapa yang telah menikmati hasil-hasilnya.

Penelitian Hermanto S. Dan Dwi W. (2007) menyatakan bahwa ketika perekonomian berkembang disuatu kawasan (negara atau kawasan tertentu yang lebih kecil), terdapat lebih banyak pendapatan untuk dibelanjakan yang jika terdistribusikan dengan baik di antara kawasan tersebut akan mengurangi kemiskinan. Kuznet (dalam Tulus Tambunan, 2001), pertumbuhan dan kemiskinan mempunyai korelasi yang sangat kuat, karena pada tahap awal proses pembangunan, tingkat kemiskinan cenderung meningkat dan pada saat mendekati tahap akhir pembangunan, jumlah orang miskin berangsur-angsur berkurang.

### **2.2.2 Pengaruh Jumlah Pengangguran terhadap Jumlah Penduduk Miskin**

Salah satu faktor penting yang menentukan kemakmuran masyarakat ialah tingkat pendapatan. Pendapatan masyarakat mencapai maksimum apabila tingkat penggunaan tenaga kerja penuh (*full employment*) dapat terwujudkan, sehingga apabila dalam kondisi tidak bekerja atau menganggur maka akan mengurangi pendapatan dan hal ini akan mengurangi tingkat kemakmuran yang mereka capai dan dapat menimbulkan buruknya kesejahteraan masyarakat (Sadono Sukirno, 2004).

Besarnya dampak krisis terhadap kemiskinan yang menyebabkan menjamurnya insiden kebangkrutan sebagai akibat tekanan pada kesempatan kerja di sektor informal perkotaan semakin besar. Hal tersebut menunjukkan adanya hubungan yang erat antara tingginya tingkat pengangguran dengan luasnya kemiskinan (Lincoln Arsyad, 1999). Pada negara yang sedang berkembang, bukan saja menghadapi kemerosotan dalam ketimpangan relatif tetapi juga masalah kenaikan dalam kemiskinan dan tingkat pengangguran. Besarnya dimensi

kemiskinan tercermin dari jumlah penduduk yang tingkat pendapatan atau konsumsinya berada di bawah tingkat minimum yang telah ditetapkan.

Hilangnya lapangan pekerjaan menyebabkan berkurangnya sebagian besar penerimaan yang digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Jika pengangguran ini terjadi pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah (tingkat pendapatan sedikit berada di atas garis kemiskinan), maka insiden pengangguran akan dengan mudah menggeser posisi mereka menjadi kelompok masyarakat miskin.

### **2.2.3 Pengaruh Inflasi terhadap Jumlah Penduduk Miskin**

Powers (1995) dan Blank (1993), menemukan hubungan yang signifikan antara inflasi dan tingkat kemiskinan. Inflasi menyebabkan daya beli masyarakat menjadi berkurang, apalagi bagi orang-orang dengan pendapatan tetap, kenaikan upah tidak secepat kenaikan harga-harga, maka inflasi ini akan menurunkan upah riil setiap individu yang berpendapatan tetap. Bagi pemilik kekayaan dalam bentuk uang akan mengalami penurunan, akan tetapi bagi pemilik kekayaan tetap seperti tanah atau bangunan dapat mempertahankan atau justru menambah nilai riil kekayaannya dikarenakan inflasi.

Dengan demikian inflasi akan menyebabkan pembagian pendapatan diantara kelompok yang berpendapatan tetap dengan para pemilik kekayaan tetap akan semakin tidak merata. Penurunan nilai pendapatan akan memicu munculnya kemiskinan, jika semakin banyak kelompok masyarakat yang pendapatannya terlampaui oleh kebutuhan hidupnya akibat penurunan nilai pendapatannya, maka

berarti kelompok masyarakat itu masuk pada kategori miskin. Dengan demikian inflasi memiliki hubungan dengan kemiskinan.

### 2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai kemiskinan telah banyak dilakukan, beberapa diantaranya digunakan sebagai referensi dalam penelitian ini. Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi adalah sebagai berikut:

- 1) Penelitian yang dilakukan oleh Hermanto Siregar dan Dwi Wahyuniarti (2007), dengan judul “Dampak Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penurunan Jumlah Penduduk Miskin”. Penelitian ini menganalisis mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode panel data. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa kenaikan PDRB mengakibatkan penurunan atas angka kemiskinan, kenaikan jumlah penduduk mengakibatkan peningkatan atas angka kemiskinan, kenaikan inflasi mengakibatkan peningkatan atas angka kemiskinan, kenaikan *share* pertanian dan industri mengakibatkan penurunan atas angka kemiskinan. Sedangkan Dummy krisis mengakibatkan peningkatan atas kemiskinan.
- 2) Penelitian yang dilakukan oleh Dian Octaviani (2001) dengan judul “Inflasi, Pengangguran, dan Kemiskinan di Indonesia: Analisis Indeks Forrester Greer & Horbecke”. Penelitian ini menganalisis tentang pengaruh pengangguran dan inflasi terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Analisis dalam penelitian ini menggunakan model ekonometri Cutler dan Kartz (1991) yang telah dimodifikasi. Hasil penelitiannya

menyimpulkan bahwa kenaikan angka pengangguran mengakibatkan peningkatan atas angka kemiskinan, kenaikan pada tingkat inflasi mengakibatkan kenaikan atas angka kemiskinan di Indonesia.

- 3) Penelitian yang dilakukan oleh Wongdesmiwati (2009), dengan judul “Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia (Analisis Ekonometri)”. Tujuan penelitian ini, untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat kemiskinan di Indonesia. Beberapa variabel yang digunakan sebagai faktor yang mempengaruhi kemiskinan antara lain jumlah penduduk, produk domestik bruto, angka melek huruf, angka harapan hidup, penggunaan listrik dan konsumsi makanan. Metode analisis yang digunakan ialah regresi berganda (*multiple regression*) dengan menggunakan alat analisis eviews 4.1 untuk meregresi data-data sekunder. Penelitian menunjukkan hanya terdapat tiga variabel yang terbukti signifikan mempengaruhi jumlah penduduk miskin, yaitu jumlah penduduk, produk domestik bruto, dan angka melek huruf.
- 4) Penelitian yang dilakukan oleh Elizabeth T. Powers (1995), dengan judul “*Inflation, Unemployment, and Poverty Revisted*”. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana pengaruh kondisi makroekonomi terhadap perubahan angka kemiskinan. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini ialah jumlah pengangguran (pria usia produktif) dan tingkat inflasi (perubahan *CPI/Consumer Price Index*). Penelitian ini menggunakan metode *multiple regression* untuk memproses data. Hasil dari penelitian ini

menyimpulkan bahwa angka pengangguran berpengaruh kuat secara positif terhadap tingkat kemiskinan dan tingkat inflasi berpengaruh positif terhadap kemiskinan yang diukur melalui jumlah pengeluaran.

**Tabel 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**

No.	Peneliti	Tujuan	Model Regresi	Metode Analisis	Hasil Empiris
1.	Hermanto Siregar dan Dwi Wahyuniarti (2007)  “Dampak Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penurunan Jumlah Penduduk Miskin”	Menganalisis dampak pertumbuhan ekonomi terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia.	$POVERTY_{ij} = 0 + 1PDRB_{ij} + 2POPULASI_{ij} + 3 AGRISHARE_{ij} + 4INDUSTRISHARE_{ij} + 5INFLASI_{ij} + 6SMP_{ij} + 7SMA_{ij} + 8DIPLM_{ij} + 9DUMMY KRISIS_{ij} + ij$ <p>Dimana:            Poverty = tingkat kemiskinan            PDRB = Produk Domestik Regional Bruto            Agrishare = pangsa sektor pertanian dalam PDRB            Industrieshare = pangsa sektor industri dalam PDRB            Inflasi = tingkat inflasi            SMP = jumlah lulusan setingkat SMP            SMA = jumlah lulusan setingkat SMA            DIPLOMA = jumlah lulusan setingkat Diploma            Dummy Krisis = dummy krisis ekonomi</p>	Model regresi data panel	Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin, jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin, <i>agrishare</i> berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin, <i>industrishare</i> berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin, capaian pendidikan SMP, SMA, dan Diploma berpengaruh negative dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin, <i>dummy krisis</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin.
2.	Dian Octaviani (2001)  “Inflasi, Pengangguran, dan Kemiskinan di Indonesia: Analisis Indeks Forrester Greer	Menganalisis dampak inflasi dan pengangguran terhadap kemiskinan di Indonesia.	$Pt = 0 + 1 (P/Y)T + 2 T + 3 \mu t + 4 Gt + t$ <p>Dimana:            Pt = tingkat kemiskinan agregat pada tahun ke t diukur dengan indeks FGT            (P/Y)t = rasio garis kemiskinan terhadap pendapatan rata-rata            T = tingkat inflasi</p>	Model ekonometri Cutler dan Katz	Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa kenaikan angka pengangguran dan inflasi mengakibatkan peningkatan atas angka kemiskinan, sebaliknya semakin kecil angka pengangguran akan menyebabkan semakin rendahnya tingkat kemiskinan di Indonesia.

	& Horbecke”.		$Gt$ = rasio gini $\mu t$ = tingkat pengangguran $t$ = error term		
3.	Wongdesmiwati (2009)  “Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia”	Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk miskin	$Y_i = 0 + 1X_{1i} + 2X_{2i} + 3X_{3i} + 4X_{4i} + 5X_{5i} + 6X_{6i} + i$  Dimana : $i = 1,2,3,\dots,n$ $Y_i$ = Jumlah penduduk miskin (Penduduk miskin) $X_{1i}$ = Jumlah penduduk Indonesia per tahun (Jumlah penduduk) $X_{2i}$ = Produk Domestik Bruto (PDB) $X_{3i}$ = Angka Harapan Hidup (AHH) $X_{4i}$ = Persentase Angka Melek Huruf (AMH) $X_{5i}$ = Persentase penggunaan listrik (Listrik) $X_{6i}$ = Persentase konsumsi makanan (KM) $0$ = intersept	Analisis regresi berganda	Variabel yang terbukti signifikan mempengaruhi jumlah penduduk miskin, yaitu jumlah penduduk, Produk Domestik Bruto (PDB), dan Angka Melek Huruf.
4.	Elizabeth T. Powers (1995)  “Inflation, Unemployment, and Poverty Revisited”	Menganalisis angka inflasi dan pengangguran terhadap perubahan angka kemiskinan.	$Y_i = 0 + 1X_{1i} + 2X_{2i} + 3X_{3i} + 4dummy\ post\ 1983i + i$  Dimana : $i = 1,2,3,\dots,n$ $Y_i$ = Jumlah penduduk miskin (Penduduk miskin) $X_{1i}$ = inflasi, pertumbuhan CPI-U $X_{2i}$ = pengangguran, laki-laki produktif $X_{3i}$ = transfer pemerintah $X_{dummyi}$ = dummy trend 1983 $0$ = intersept	Analisis regresi berganda	Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa angka pengangguran berpengaruh kuat secara positif terhadap tingkat kemiskinan dan tingkat inflasi berpengaruh positif terhadap kemiskinan yang diukur melalui jumlah pengeluaran.

## 2.4 Kerangka Pemikiran Teoritis

*Millennium Development Goal* nomor 7 (target 11) menetapkan tujuan untuk pengentasan kemiskinan perkotaan dengan perbaikan kehidupan setidaknya 100 juta penghuni kawasan kumuh. Perkiraan menunjukkan bahwa sekitar sepertiga dari penduduk perkotaan di negara berkembang (hampir satu miliar orang) yang tinggal di daerah kumuh. Permukiman kumuh umumnya dicirikan sebagai permukiman informal dengan perumahan berkualitas rendah, terbatasnya akses terhadap pelayanan, kepadatan tinggi, dan kepemilikan lahan sering tidak aman. Kemiskinan dapat tumbuh lebih cepat di perkotaan dibandingkan dengan pedesaan karena krisis cenderung memberi pengaruh terburuk kepada beberapa sektor ekonomi utama di wilayah perkotaan, seperti konstruksi, perdagangan, dan perbankan yang membawa dampak negatif terhadap pengangguran di perkotaan.

Peningkatan angka Produk Domestik Regional Bruto menunjukkan sejauhmana aktivitas perekonomian menghasilkan nilai tambah bagi masyarakat pada suatu periode tertentu. Tambahan pendapatan dari aktifitas ekonomi akan berpengaruh terhadap kemiskinan jika mampu menyebar di setiap golongan pendapatan, termasuk golongan miskin. Semakin banyak golongan miskin yang memperoleh manfaat dari peningkatan angka PDRB maka tingkat kesejahteraan semakin meningkat dan terlepas dari kemiskinan.

Pengangguran akan menimbulkan berbagai masalah ekonomi dan sosial. Kondisi menganggur mengakibatkan seseorang tidak dapat memiliki pendapatan, sehingga kesejahteraan yang telah dicapai akan makin merosot. Semakin turnya

kesejahteraan masyarakat karena mengganggu tentunya akan meningkatkan peluang terjebak dalam kemiskinan.

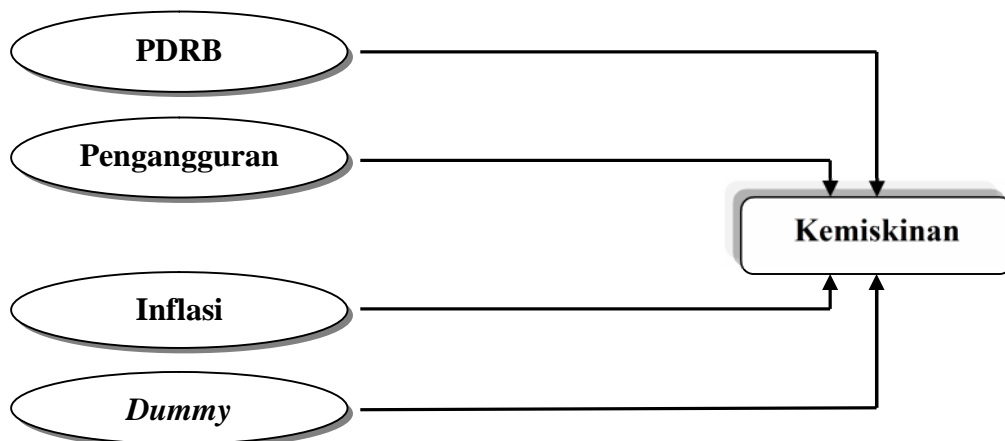
Dampak inflasi yang nyata ialah meningkatnya harga-harga kebutuhan hidup. Dengan kondisi pendapatan yang relatif minim dan tetap, adanya inflasi yang tidak terkendali akan mengakibatkan makin sulitnya memenuhi kebutuhan hidup layak. Kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi akan mengakibatkan seseorang untuk masuk dalam kemiskinan.

Hermanto Siregar dan Dwi Wahyuniarti (2007), menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang lazim dipergunakan untuk melihat keberhasilan pembangunan terhadap penurunan jumlah penduduk miskin, yang dapat dilihat melalui jumlah output (PDRB) yang dihasilkan oleh suatu daerah. Faktor-faktor lain yang juga mempengaruhi jumlah penduduk miskin antara lain, pertumbuhan jumlah penduduk, tingkat share pertanian dan industri, tingkat inflasi, dan pendidikan. Elizabeth T. Powers (1995), menganalisis kondisi makroekonomi terhadap angka kemiskinan, dimana pengangguran (tingkat produktifitas pekerja pria) dan inflasi (perubahan *consumer price index*) merupakan variabel yang berpengaruh terhadap angka kemiskinan sehingga dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana pengaruh variabel PDRB, angka pengangguran, dan tingkat inflasi.

Penelitian ini mengkaitkan jumlah penduduk miskin yang dipengaruhi variabel PDRB, angka pengangguran, dan tingkat inflasi dalam suatu kerangka pemikiran. Kemudian variabel-variabel tersebut berperan sebagai variabel independen (bebas) dan bersamaan dengan variabel dependen (terikat) yaitu

jumlah penduduk miskin serta dengan menggunakan *dummy* wilayah, diukur dengan alat analisis regresi untuk mendapat tingkat signifikansi. Dengan hasil regresi tersebut diharapkan mendapat tingkat signifikansi tiap-tiap variabel independendalam mempengaruhi kemiskinan sesuai dengan teori yang ada. Selanjutnya, hasil analisis regresi pada tiap variabel yang signifikan dan secara teori sesuai dalam mempengaruhi kemiskinan diharapkan mampu memberikan gambaran kepada pemerintah dan pihak yang terkait, mengenai penyebab kemiskinan untuk dapat merumuskan suatu kebijakan yang relevan dalam upaya pengentasan kemiskinan. Secara skema kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut:

**Gambar 2.6**  
**Kerangka Pemikiran**



Penelitian ini merupakan penelitian yang membuktikan penelitian sebelumnya Elizabeth T. Powers (1995) dengan menggunakan variabel penelitian pengangguran dan inflasi yang mempengaruhi kemiskinan, serta penggunaan variabel PDRB sebagai variabel independen dari penelitian dari Hermanto siregar dan Dwi Wahyuniarti (2007). Lebih lanjut, penelitian ini memfokuskan

permasalahan kemiskinan yang terjadi di wilayah kota berdasar penelitian M. Ravallion (2007). Penggunaan variabel-variabel dalam penelitian ini diharapkan dapat membuktikan pengaruh PDRB, pengangguran, dan inflasi terhadap jumlah penduduk miskin. Dalam penelitian ini menggunakan data panel yang terdiri dari data *time-series* tahun 2007-2010 dan data *cross-section* dari 44 kota di seluruh Indonesia.

## 2.5 Hipotesis

Hipotesis merupakan suatu pernyataan yang bersifat sementara tentang adanya suatu hubungan tertentu antara variabel-variabel yang digunakan. Sifat sementara pada hipotesis ini berarti bahwa hipotesis dapat diubah, diganti dengan hipotesis lain yang lebih tepat. Hal ini dimungkinkan karena hipotesis yang diperoleh tergantung pada permasalahan yang diteliti dan konsep yang digunakan.

Berdasar teori dan permasalahan yang ada, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Diduga variabel PDRB berpengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin.
2. Diduga variabel pengangguran berpengaruh positif terhadap jumlah penduduk miskin.
3. Diduga variabel tingkat inflasi berpengaruh positif terhadap jumlah penduduk miskin.
4. Diduga variabel PDRB, pengangguran, dan tingkat inflasi secara bersama-sama mempengaruhi jumlah penduduk miskin.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional**

##### **3.1.1 Variabel Penelitian**

Variabel penelitian merupakan konsep yang dapat diukur dengan berbagai macam nilai untuk memberikan gambaran nyata mengenai fenomena yang diteliti. Dalam penelitian ini terdapat satu variabel endogen (*dependent*) dan tiga variabel eksogen (*independent*). Variabel endogen dalam penelitian ini adalah kemiskinan, sedangkan variabel eksogen yang digunakan dalam penelitian ini ialah PDRB, pengangguran, dan inflasi.

##### **3.1.2 Definisi Operasional**

Pendefinisian secara operasional bertujuan agar variabel penelitian yang telah ditetapkan dapat dioperasionalkan, sehingga memberikan petunjuk tentang bagian suatu variabel dapat diukur. Definisi operasional variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

###### 1) Kemiskinan

Kemiskinan dalam penelitian ini mengacu pada jumlah penduduk miskin, yang dimaksud dengan jumlah penduduk miskin ialah jumlah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita di bawah garis kemiskinan. BPS mengeluarkan batas kemiskinan desa dan kota pada tahun 2010 sebesar Rp. 211.726.

###### 2) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto menunjukkan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah. Secara umum PDRB diartikan sebagai keseluruhan nilai barang dan jasa yang diproduksi di dalam suatu daerah tertentu dalam satu tahun tertentu. PDRB yang digunakan dalam penelitian ini ialah PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000 selama tahun 2007 hingga 2010 di 44 kota seluruh Indonesia. Satuan yang digunakan ialah PDRB dalam milyar rupiah.

### 3. Pengangguran

Pengangguran yang dimaksudkan dalam penelitian ini ialah jumlah pengangguran terbuka. Menurut BPS pengangguran terbuka ialah penduduk yang sedang mencari pekerjaan, penduduk yang sedang mempersiapkan suatu usaha, penduduk yang merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, penduduk yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Data yang digunakan ialah jumlah pengangguran terbuka di 44 kota pada tahun 2007 hingga 2010. Pada beberapa daerah angka pengangguran diperoleh melalui data tenaga kerja yang mendaftar atau mencari pekerjaan melalui dinas tenaga kerja dan transmigrasi. Satuan yang dipergunakan ialah jumlah jiwa.

### 4. Inflasi

Inflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dimana barang dan jasa tersebut merupakan kebutuhan pokok masyarakat. Data inflasi yang dipergunakan merupakan inflasi yoy (*year on year*) dari bulan desember tahun  $t$  hingga bulan desember tahun  $t-1$ . Dalam penghitungan

inflasi digunakan Indeks Harga Konsumen (IHK) yang mencakup harga konsumen antara 284 hingga 441 barang dan jasa. Penggunaan data inflasi dalam penelitian ini dari inflasi yang terjadi di masing-masing kota dalam kurun waktu 2007-2010 dalam satuan persen.

#### 5. *Dummy* Wilayah

Estimasi model panel dalam penelitian ini menggunakan variabel *dummy*, yaitu *dummy* wilayah yang meliputi 44 kota di Indonesia. Penggunaan 44 kota tersebut mengacu pada penelitian World Bank “*The Rise of Metropolitan Regions: Towards Inclusive and Sustainable Regional Development*”. Pengklasifikasian 44 kota tersebut berdasarkan ukuran (*size*) atau populasi kota dengan menggunakan data Susenas 1996 hingga 2007. Jakarta dijadikan wilayah acuan (*benchmark*) bagi wilayah kota yang lain, hal ini dikarenakan Jakarta mempunyai jumlah penduduk miskin terbesar selama periode penelitian. Penggunaan *dummy* wilayah dalam penelitian ini bertujuan untuk memperlihatkan perbedaan yang terjadi antar wilayah dalam empat tahun. Dalam penelitian ini digunakan 43 *dummy* wilayah.

### 3.2 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data sekunder, yaitu data yang diperoleh berdasarkan informasi yang telah disusun dan dipublikasikan oleh instansi tertentu. Data sekunder dalam penelitian ini merupakan penggabungan dari data *time series* dari tahun 2007 hingga 2010 dan data *cross section* dari 44 kota di Indonesia sehingga diperoleh 176 observasi.

Data dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa sumber, antara lain:

1. Kemiskinan

Diperoleh dari Data dan Informasi Kemiskinan tahun 2007, 2008, 2009, dan 2010 yang mencakup kemiskinan diberbagai kabupaten/kota seluruh Indonesia, diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Indonesia.

2. PDRB

Diperoleh dari Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia, PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Kabupaten/Kota tahun 2007-2010. Dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik Indonesia.

3. Pengangguran

Data pengangguran terbuka untuk masing-masing kota serta pencari kerja yang terdaftar di Disnakertrans tahun 2007-2010 melalui terbitan Daerah Dalam Angka masing-masing kota dan beberapa publikasi Keadaan Angkatan Kerja dari beberapa provinsi yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Indonesia.

4. Inflasi

Data inflasi diperoleh berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik Indonesia yang terangkum dalam Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia 2007-2010 serta beberapa publikasi Daerah Dalam Angka provinsi-provinsi tertentu.

### **3.3 Metode Pengumpulan Data**

Data yang dipergunakan dalam mencapai tujuan penelitian ini sepenuhnya diperoleh melalui proser studi pustaka literatur ataupun publikasi dari instansi

yang terkait sebagai metode pengumpulan datanya, sehingga tidak dipergunakan teknik sampling serta kuesioner. Sebagai pendukung, digunakan buku referensi, jurnal, media berita, serta *browsing internet* terkait permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

### 3.4 Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Analisis deskriptif kuantitatif, digunakan untuk menganalisis informasi kuantitatif (data yang dapat diukur, diuji, dan diinformasikan dalam bentuk persamaan, tabel, dan sebagainya) yang dideskripsikan secara lebih jelas. Tahap analisis kuantitatif terdiri dari: estimasi model regresi menggunakan data panel, regresi persamaan linier berganda dengan menggunakan *Fixed Effect Model* (FEM), uji statistik, dan uji asumsi klasik.

### 3.5 Estimasi Model Regresi

Gujarati (2003), data panel adalah kombinasi data kurun waktu dan lintas sektoral, dimana data kurun waktu merupakan data yang dikumpulkan dari beberapa periode waktu yang berbeda. Sementara data lintas sektor ialah data yang dikumpulkan pada satu titik waktu yang sama. Menurut Baltagi (dalam Insukindro. dkk, 2004), keunggulan penggunaan data panel dibanding data runtun waktu dan lintas sektor ialah: (1) Estimasi data panel dapat menunjukkan adanya heterogenitas dalam tiap unit. (2) Data lebih informatif, mengurangi kolonieritas antara variabel, meningkatkan derajat kebebasan dan lebih efisien. (3) Data panel cocok digunakan untuk menggambarkan adanya dinamika perubahan. (4) Data panel lebih mampu mendeteksi dan mengukur dampak. (5) Data panel dapat

digunakan untuk studi dengan model yang lebih lengkap. (6) Data panel meminimumkan bias yang mungkin dihasilkan dalam agregasi.

Gujarati dalam Firmansyah (2006), menjelaskan bahwa estimasi model regresi dengan menggunakan data panel tergantung pada asumsi yang digunakan pada intersep, koefisien slope, dan *error term*. Kemungkinannya yaitu:

- a. Asumsi bahwa intersep dan koefisien slope (kemiringan) adalah konstan antar waktu dan ruang, *error term* mencakup perbedaan sepanjang waktu dan individu.
- b. Koefisien slope konstan tapi intersep bervariasi antar individu.
- c. Koefisien slope konstan tapi intersep bervariasi antar waktu.
- d. Koefisien slope konstan tetapi intersep bervariasi antar waktu dan individu.
- e. Seluruh koefisien (intersep dan koefisien slope) bervariasi antar individu.
- f. Intersep konstan sebagaimana koefisien slope bervariasi antar kurun waktu.

Dalam model data panel, persamaan dengan menggunakan data *cross-section* dapat ditulis sebagai berikut:

$$Y_i = \alpha + \beta X_i + \epsilon_i ; i = 1, 2, \dots, N \dots\dots\dots (3.1)$$

dimana N merupakan banyaknya data *cross-section*.

Sedangkan persamaan model dengan *time-series* dapat ditulis:

$$Y_t = \alpha + \beta X_t + \epsilon_t ; t = 1, 2, \dots, T \dots\dots\dots (3.2)$$

dimana T merupakan banyaknya data *time-series*.

Dikarenakan data panel merupakan penggabungan dari data *time-series* dan *cross-section*, maka persamaannya dapat ditulis menjadi:

$$Y_{it} = \alpha + \beta X_{it} + \epsilon_{it}; i = 1, 2, \dots, N; t = 1, 2, \dots, T \dots\dots\dots (3.3)$$

dimana:

N : banyaknya observasi

T : banyaknya waktu

NxT : banyaknya data panel

Dalam analisis model data panel, dikenal tiga macam pendekatan yang terdiri dari *Pooled Least Square* (PLS), *Fixed Effect* (FE), dan *Random Effect* (RE). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Efek Tetap atau *Fixed Effect* (FE). Dalam pemilihan model analisis data panel digunakan uji Hausman yang terdapat dalam program *evIEWS 7*. Uji Hausman digunakan untuk membandingkan mana yang lebih tepat antara *Fixed Effect Model* dan *Random Effect Model* bila menggunakan data panel dalam penelitian ini. Hipotesis yang dipergunakan dalam uji Hausman ialah:

$H_0 =$  *random effect* lebih baik daripada *fixed effect*

$H =$  *fixed effect* lebih baik daripada *random effect*

Uji nilai statistik Hausman signifikan apabila probabilitasnya kurang dari taraf nyata, sehingga  $H_0$  ditolak yang artinya FEM lebih baik daripada REM.

Melalui *command EvIEWS program* diketahui hasil dari uji Hausman sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Uji Hausman**

Hausman test for fixed versus random effect	
Chi-squared	0.00621
Prob-value	0.058

*Sumber: Olah data Eviews*

Dari tabel hasil uji Hausman di atas, diketahui bahwa *p-value* ialah 0,074 dan signifikan pada  $\alpha$ : 10 persen. Artinya,  $H_0$  ditolak atau *fixed effect* lebih baik daripada *random effect*, sehingga FEM digunakan dalam model penelitian.

*Fixed Effect Model* mengasumsikan bahwa persamaan regresi memiliki slope konstan sedangkan intersep bervariasi antar individu. Dalam hal ini, intersep dari masing-masing individu diasumsikan memiliki perbedaan yang disebabkan oleh karakteristik khusus yang dimiliki oleh masing-masing individu. Terminologi *fixed effect* menunjukkan bahwa meskipun intersep bervariasi sepanjang individu, namun setiap intersep individu tersebut tidak bervariasi sepanjang waktu, yang disebut *time invariant*. Dapat juga dinyatakan bahwa berdasarkan model FEM, diasumsikan bahwa koefisien slope dari regresor tidak bervariasi antar individu maupun antar waktu.

Model dasar dalam penelitian ini merujuk pada model yang pernah digunakan dalam penelitian Hermanto Siregar dan Dwi Wahyuniarti (2008), dan Wongdesmiwati (2010). Model dalam penelitian ini merumuskan bahwa kemiskinan merupakan fungsi dari PDRB, pengangguran, dan inflasi.

$$K = f(PDRB, P, I) \quad \dots\dots\dots (3.4)$$

Model dasar (3.4) diturunkan menjadi model ekonometrik sebagai berikut:

$$K_{it} = \beta_0 + \beta_1 PDRB_{it} + \beta_2 P_{it} + \beta_3 I_{it} + \varepsilon_{it} \quad \dots\dots\dots (3.5)$$

Dimana  $i$  menunjukkan unit *cross section* dan  $t$  menunjukkan periode waktu (*time series*).

Kesulitan terbesar dalam pendekatan metode kuadrat terkecil biasa adalah asumsi *intercept* dan *slope* dari persamaan regresi yang dianggap konstan baik antar daerah maupun antar waktu yang mungkin tidak beralasan. Generalisasi secara umum sering dilakukan dengan memasukkan variabel boneka (*dummy variable*) untuk mengizinkan terjadinya perbedaan nilai parameter yang berbeda-beda antar unit *cross section*. Pendekatan dengan memasukan variabel boneka ini dikenal dengan sebutan model efek tetap (*fixed effect*) atau *Least Square Dummy Variable* (LSDV) atau disebut juga *covariance model*.

Penggunaan *dummy* wilayah dalam penelitian ini adalah untuk melihat perbedaan yang terjadi antar wilayah (kota) dalam empat tahun periode penelitian, dimana Jakarta merupakan wilayah acuan (*benchmark*). Alasan penggunaan Jakarta sebagai *benchmark* dikarenakan Jakarta memiliki jumlah penduduk miskin yang paling tinggi.

Setelah memasukkan variabel *dummy* wilayah ke dalam persamaan (3.5), maka model persamaan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} K_{it} = & \beta_0 + \beta_1 PDRB_{it} + \beta_2 P_{it} + \beta_3 I_{it} + \delta_1 D_1 + \delta_2 D_2 + \delta_3 D_3 + \\ & \delta_4 D_4 + \delta_5 D_5 + \delta_6 D_6 + \delta_7 D_7 + \delta_8 D_8 + \delta_9 D_9 + \delta_{10} D_{10} + \delta_{11} D_{11} + \\ & \delta_{12} D_{12} + \delta_{13} D_{13} + \delta_{14} D_{14} + \delta_{15} D_{15} + \delta_{16} D_{16} + \delta_{17} D_{17} + \delta_{18} D_{18} + \\ & \delta_{19} D_{19} + \delta_{20} D_{20} + \delta_{21} D_{21} + \delta_{22} D_{22} + \delta_{23} D_{23} + \delta_{24} D_{24} + \delta_{25} D_{25} + \\ & \delta_{26} D_{27} + \delta_{28} D_{28} + \delta_{29} D_{29} + \delta_{30} D_{30} + \delta_{31} D_{31} + \delta_{32} D_{32} + \delta_{33} D_{33} + \end{aligned}$$

$$\delta_{34}D_{34} + \delta_{35}D_{35} + \delta_{35}D_{35} + \delta_{36}D_{36} + \delta_{37}D_{37} + \delta_{38}D_{38} + \delta_{39}D_{39} + \delta_{40}D_{40} + \delta_{41}D_{41} + \delta_{42}D_{42} + \delta_{43}D_{43} + \varepsilon_{it} \dots\dots\dots (3.6)$$

Dimana:

K = jumlah kemiskinan di 44 kota

PDRB = Produk Domestik Regional Bruto di 44 kota

P = jumlah pengangguran di 44 kota

I = tingkat inflasi di 44 kota

$D_1$  = *dummy* kota Surabaya

$D_2$  = *dummy* kota Bandung

$D_3$  = *dummy* kota Yogyakarta

$D_4$  = *dummy* kota Cirebon

$D_5$  = *dummy* kota Semarang

$D_6$  = *dummy* kota Medan

$D_7$  = *dummy* kota Kediri

$D_8$  = *dummy* kota Pekalongan

$D_9$  = *dummy* kota Mataram

$D_{10}$  = *dummy* kota Surakarta

$D_{11}$  = *dummy* kota Makasar

$D_{12}$  = *dummy* kota Bandar Lampung

$D_{13}$  = *dummy* kota Padang

$D_{14}$  = *dummy* kota Tegal

$D_{15}$  = *dummy* kota Denpasar

$D_{16}$  = *dummy* kota Palembang

$D_{17}$	= <i>dummy</i> kota Tanjung Balai
$D_{18}$	= <i>dummy</i> kota Payakumbuh
$D_{19}$	= <i>dummy</i> kota Malang
$D_{20}$	= <i>dummy</i> kota Madiun
$D_{21}$	= <i>dummy</i> kota Pekanbaru
$D_{22}$	= <i>dummy</i> kota Banjarmasin
$D_{23}$	= <i>dummy</i> kota Manado
$D_{24}$	= <i>dummy</i> kota Samarinda
$D_{25}$	= <i>dummy</i> kota Pontianak
$D_{26}$	= <i>dummy</i> kota Balikpapan
$D_{27}$	= <i>dummy</i> kota Jambi
$D_{28}$	= <i>dummy</i> kota Pare-pare
$D_{29}$	= <i>dummy</i> kota Sukabumi
$D_{30}$	= <i>dummy</i> kota Palu
$D_{31}$	= <i>dummy</i> kota Kupang
$D_{32}$	= <i>dummy</i> kota Bengkulu
$D_{33}$	= <i>dummy</i> kota Ambon
$D_{34}$	= <i>dummy</i> kota Kendari
$D_{35}$	= <i>dummy</i> kota Pematang Siantar
$D_{36}$	= <i>dummy</i> kota Probolinggo
$D_{37}$	= <i>dummy</i> kota Banda Aceh
$D_{38}$	= <i>dummy</i> kota Jayapura
$D_{39}$	= <i>dummy</i> kota Tarakan

$D_{40}$  = *dummy* kota Gorontalo

$D_{41}$  = *dummy* kota Pangkal Pinang

$D_{42}$  = *dummy* kota Tebing Tinggi

$D_{43}$  = *dummy* kota Sibolga

$\beta_0$  = intersep

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$  = koefisien regresi variabel bebas

$\delta_1 - \delta_{43}$  = koefisien *dummy* wilayah

$\varepsilon_{it}$  = komponen *error* di waktu  $t$  untuk unit *cross section*  $i$

$i$  = 1, 2, 3, ..., 43 (data *cross section* kota di Indonesia)

$t$  = 1, 2, 3, 4 (data *time series*, tahun 2007-2010)

### 3.6 Pelanggaran Asumsi Model Regresi Linier Klasik

Untuk menghasilkan model yang sah secara teoritis, maka suatu model harus memenuhi beberapa asumsi klasik. Hal ini diperlukan agar hasil yang diperoleh dapat konsisten dan efisien secara teori. Menurut Gujarati (2003), ada sebelas asumsi utama yang mendasari model regresi linear klasik dengan menggunakan *ordinary least square* (OLS), atau yang dikenal dengan asumsi klasik:

- a. Model regresi linear, artinya linear dalam parameter.
- b. Nilai  $X$  diasumsikan non-stokastik, artinya nilai  $X$  dianggap tetap dalam sampel yang berulang.
- c. Nilai rata-rata kesalahan  $\mu_i$  adalah nol.
- d. Homokedastisitas, artinya varians kesalahan sama untuk setiap periode (Homo = sama, Skedastisitas = sebaran).

- e. Tidak ada autokolerasi antar kesalahan (antar  $\mu_i$  dan  $\mu_j$  tidak ada korelasi).
- f. Antara  $\mu_i$  dan  $\mu_j$  saling bebas.
- g. Jumlah observasi,  $n$  harus lebih besar daripada jumlah parameter yang diestimasi (jumlah variabel independen).
- h. Adanya variabilitas dalam  $X_i$ , artinya nilai  $X_i$  harus beda.
- i. Model regresi telah dispesifikasi secara benar, dengan kata lain tidak ada bias (kesalahan) spesifikasi dalam model yang digunakan dalam analisis empirik.
- j. Tidak ada multikolinearitas yang sempurna antar variabel independen.
- k. Nilai kesalahan  $\mu_i$  terdistribusikan secara normal.

Proses pengujian asumsi klasik dilakukan bersama dengan proses uji regresi, sehingga langkah-langkah yang dilakukan dalam pengujian asumsi klasik menggunakan langkah kerja yang sama dengan uji regresi. Ada empat uji asumsi klasik yang harus dilakukan terhadap suatu model regresi, yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, dan uji autokolerasi.

### 1. Multikolinearitas

Multikolinearitas diartikan sebagai adanya hubungan linier antara beberapa atau semua variabel bebasnya pada model regresi. Untuk melihat adanya multikolinearitas pada model, dapat dideteksi dengan cara melihat *correlation matrix*. Jika korelasi antara variabel bebas kurang dari 0,8 maka dapat dikatakan tidak ada multikolinearitas. Uji multikolinearitas juga dapat dilakukan dengan melihat hasil estimasi OLS.

Jika hasil estimasi memiliki nilai *R squared* dan *adjusted R squared* yang tinggi disertai dengan nilai *t* yang signifikan maka model diabaikan dari masalah multikolinearitas. Tetapi jika hasil estimasi memiliki nilai *R squared* dan *adjusted R squared* yang tinggi tetapi memiliki nilai *t* yang tidak signifikan maka model diindikasikan memiliki masalah multikolinearitas. Multikolinearitas dalam penelitian ini juga diuji menggunakan *auxiliary regressions* untuk mendeteksi adanya multikolinearitas. Kriterianya adalah jika  $R^2$  regresi persamaan utama lebih besar dari  $R^2$  regresi *auxiliary* maka di dalam model tidak terdapat multikolinearitas.

Untuk mengatasi masalah multikolinearitas cara yang paling mudah adalah dengan cara menghilangkan salah satu variabel, terutama yang tidak signifikan secara parsial (uji *t*). Namun hal ini seringkali tidak dipergunakan karena akan menciptakan bias parameter yang spesifikasi pada model. Cara-cara lain yang juga dapat dilakukan ialah dengan menambah jumlah data atau mengurangi jumlah data observasi, menambah jumlah variabel bebasnya, mengkombinasikan data *cross-section* dan *time series*, mengganti data, dan mentransformasi variabel.

## 2. Heterokedastisitas

Heterokedastisitas adalah pelanggaran asumsi dimana *varians* dari setiap *error* dari variabel bebas tidak konstan dari waktu ke waktu. Heterokedastisitas menyebabkan hasil estimasi dengan metode OLS menghasilkan parameter yang bias, dan tidak efisien meskipun konsisten.

Hal ini menunjukkan bahwa koefisien yang dihasilkan bukan berasal dari *varians* yang kecil.

Pengujian terhadap heteroskedastisitas pada metode OLS dapat diuji dengan menggunakan *White Test* dengan menggunakan residual kuadrat sebagai variabel dependen, dan variabel independennya terdiri atas variabel independen yang sudah ada, ditambah dengan kuadrat variabel independen, ditambah lagi dengan perkalian dua variabel independen. Jika nilai probabilitas  $Obs \cdot R\text{-squared}$  lebih kecil dari  $\alpha$ : 5 persen, maka dapat disimpulkan data bersifat heterokedastis (Winarno, 2009).

Uji heteroskedastisitas dalam metode data panel dapat dilakukan dengan metode *cross-section weighting* yang tersedia dalam program Eviews. Dimana jika terdapat masalah heteroskedastisitas maka nilai *R-square* dari *cross-section weighting* akan lebih besar daripada *no weighting*. Jika model mengalami masalah ini, maka dengan metode *cross-section weighting* tersebut masalah sudah teratasi. Cara lain yang dapat dilakukan untuk menghilangkan heteroskedastisitas adalah menggunakan *White Heteroskedasticity-Consistent Standart Errors & Covariance* saat melakukan estimasi data panel.

### 3. Autokorelasi

Autokorelasi adalah pelanggaran asumsi dimana terdapat korelasi serial antar *error*. Untuk menguji ada tidaknya autokorelasi dapat digunakan uji formal dan informal. Uji formal dengan DW (*Durbin-*

*Watson) statistic*, jika  $DW > 2$  atau  $DW < 2$  (tidak mendekati 2) maka dapat dikatakan adanya indikasi autokorelasi. Akan tetapi pengujian dengan DW seringkali menimbulkan ambiguitas sehingga diperlukan pengujian formal.

Pengujian formal dilakukan dengan menggunakan uji *Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test*. Jika  $p\text{-value} < \alpha$  maka terdapat indikasi adanya autokorelasi pada model tersebut. Untuk mengatasi masalah autokorelasi dapat menggunakan cara menambah variabel AR (*autoregressive*) atau MA (*moving average*), menambah *lag* terikat variabel atau menambah *lag* pada variabel bebas, serta melakukan *differencing* atau melakukan regresi nilai turunan. Apabila nilai probabilitas  $\text{Obs} \cdot R\text{-squared}$  lebih besar dari  $\alpha$ : 5 persen, maka data tidak mengandung masalah autokorelasi (Winarno, 2009). Secara manual jika  $(n-p) \cdot R^2$  atau  $X^2_{hitung}$  lebih besar dari  $X^2_{tabel}$  maka hipotesis nol yang menyatakan bahwa tidak ada autokorelasi dalam model ditolak (Firmansyah, 2006).

#### 4. Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk memeriksa apakah *error term* mendekati distribusi normal atau tidak. Uji normalitas *error term* dilakukan dengan menggunakan uji *Jarque-Bera*. Uji ini didasarkan pada *error* penduga *Least Squares*.

Ada beberapa metode untuk mengetahui normal atau tidaknya distribusi residual antara lain J-B Test dan metode grafik. Penelitian ini

menggunakan metode J-B test yang dilakukan dengan menghitung nilai skewness dan kurtosis, apabila nilai J-B tidak signifikan (lebih kecil dari 2), maka data berdistribusi normal dan bila probabilitasnya  $> 5$  persen, maka data berdistribusi normal (Winarno, 2009).

### 3.7 Pengujian Statistik Analisis Regresi

Setelah melakukan pengolahan data dengan metode panel, selanjutnya adalah melakukan pengujian terhadap hasil output. Pengujian ini dilakukan menurut kriteria statistik dan kriteria ekonomi. Pada pengujian kriteria ekonomi diuji apakah hasil koefisien regresi sudah sesuai teori ekonomi yang ada. Kriteria statistik dilakukan dengan cara melakukan pengujian-pengujian sebagai berikut.

#### 1. Uji Parsial (uji t)

Analisis statistik secara parsial digunakan untuk melihat signifikansi dari masing-masing variabel bebas secara individual dalam menjelaskan variabel terikat pada model dengan menggunakan uji t, dimana hipotesis nol ( $H_0: \beta = 0$ ) artinya nilai koefisien sama dengan nol, sedangkan hipotesis alternatif ( $H_1: \beta \neq 0$ ) artinya koefisien berbeda dengan nol. Signifikansi ini secara langsung dapat dilihat dari besarnya angka probabilitas. Jika *p-value* (t-statistik) lebih kecil dari  $\alpha$  ( $\alpha = 5\%$  atau 0,05) maka variabel bebas tersebut berpengaruh signifikan terhadap variabel terikatnya atau  $H_0$  ditolak. Cara lain dalam melakukan uji t, dengan membandingkan nilai  $t_{hitung}$  dengan  $t_{tabel}$  (df;n-k). Apabila  $t_{hitung}$  lebih besar daripada  $t_{tabel}$  maka  $H_0$  ditolak. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

## Hipotesis 1

$H_0 \beta_1 = 0$  Produk Domestik Regional Bruto tidak berpengaruh signifikan secara individu terhadap kemiskinan.

$H_0 \beta_1 < 0$  Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh negatif dan signifikan secara individu terhadap kemiskinan.

## Hipotesis 2

$H_0 \beta_2 = 0$  Pengangguran tidak berpengaruh signifikan secara individu terhadap kemiskinan.

$H_0 \beta_2 < 0$  Pengangguran berpengaruh positif dan signifikan secara signifikan terhadap kemiskinan.

## Hipotesis 3

$H_0 \beta_3 = 0$  Inflasi tidak berpengaruh signifikan secara individu terhadap kemiskinan.

$H_0 \beta_3 < 0$  Inflasi berpengaruh positif dan signifikan secara individu terhadap kemiskinan.

## Hipotesis 4

$H_0 \delta_1, \dots, \delta_{43} = 0$  *dummy* wilayah tidak berpengaruh signifikan secara individu terhadap kemiskinan.

$H_0 \quad \delta_1, \dots, \delta_{43} < 0$  *dummy* wilayah berpengaruh negatif dan signifikan secara individu terhadap kemiskinan.

## 2. Persamaan Regresi Keseluruhan (uji F)

Dalam pengujian ini diuji apakah semua variabel bebas secara bersama-sama mempengaruhi variabel terikat. Pengujian ini dilakukan dengan distribusi F. Signifikansi pengujian ini secara langsung dapat dilihat dari besarnya angka probabilitas. Jika *p-value* (F-statistiknya) lebih kecil dari  $\alpha$  ( $\alpha = 5\%$  atau 0,05) maka seluruh variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikatnya.

Hipotesis nol ( $H_0$ ) yang diajukan dalam penelitian ini adalah apakah semua variabel independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen, atau:

$$H_0 \quad \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$$

Sedangkan hipotesis alternatifnya ( $H_1$ ) adalah semua variabel independen mampu mempengaruhi variabel dependen secara bersama-sama, atau:

$$H_1 \quad \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 \neq 0$$

Kriteria dalam uji F yaitu bila nilai  $F_{hitung}$  lebih besar dibandingkan dengan nilai  $F_{tabel}$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Atau apabila  $F_{hitung}$  lebih besar dari  $F_{tabel}$  maka variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen secara bersama-sama.  $F_{tabel}$

diperoleh dengan derajat kebebasan variasi regresi  $k$  (banyaknya variabel), dan derajat kebebasan variasi residual  $n-k-1$  (banyaknya observasi-banyaknya variabel-1).

### 3. Pengujian $R^2$

Dalam pengujian ini diuji sejauh mana variasi dari variabel terikat mampu dijelaskan oleh variabel bebasnya. Nilai  $R^2$  merupakan fraksi dari variasi yang mampu dijelaskan oleh variabel bebas terhadap variabel terikat. Nilai  $R^2$  berkisar antara 0 – 1 persen, dan jika nilainya mendekati 1 maka semakin baik. Adapun perhitungan nilai  $R^2$  adalah sebagai berikut:

$$R^2 = 1 - \frac{ESS}{TSS} = \frac{RSS}{TSS}$$

Dimana: TSS = *Total Sum of Square*

ESS = *Error Sum of Square*

RSS = *Regression Sum of Square*